



BAPELLITBANGDA
KABUPATEN
PASURUAN

PELAPORAN PENYELENGGAAN SEKOLAH RAKYAR *DI KABUPATEN PASURUAN* **TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Pasuruan ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi komprehensif atas inisiasi, perencanaan, dan progres implementasi salah satu program strategis daerah di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Langkah strategis ini dilaksanakan selaras dengan amanat nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 151/Huk/2025. Dengan landasan yuridis yang kuat, program ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural antar-generasi di daerah kita.

Secara konseptual, Sekolah Rakyat mengusung paradigma "Pendidikan Menyeluruh" yang melampaui batas pendidikan formal semata. Melalui sistem berasrama penuh (boarding school), kami menerapkan pola pembinaan terintegrasi: kegiatan belajar akademik formal dilaksanakan pada siang hari, sementara penguatan pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan dilakukan secara intensif pada malam hari. Pendekatan ini dirancang untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mentalitas tangguh dan keterampilan hidup (life skills) yang mumpuni sebagai bekal kemandirian masa depan.

Lebih lanjut, inisiatif ini juga mencerminkan optimalisasi aset pemerintah daerah demi kemaslahatan publik. Pemanfaatan eks Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Gedung Hayam Wuruk) untuk lokasi SR 1A dan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) Rejoso untuk lokasi SR 1C yang pembangunan rehabilitasinya telah mencapai 100% menunjukkan efisiensi dan keseriusan pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan yang layak. Seluruh fasilitas ini, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga kebutuhan logistik harian,

disediakan sepenuhnya secara gratis untuk meringankan beban keluarga penerima manfaat.

Dokumen laporan ini menyajikan gambaran utuh mulai dari kondisi wilayah dan tantangan kependudukan, konsep dasar dan kebijakan program, analisis kesiapan infrastruktur, hingga dinamika rekrutmen peserta didik dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk melalui Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat. Kami menyadari bahwa pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan, namun dengan sinergi seluruh pihak, kami optimis tujuan mulia program ini dapat tercapai.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari jajaran Perangkat Daerah terkait, Tim Satuan Tugas Sekolah Rakyat, hingga seluruh elemen masyarakat yang mendukung terwujudnya inisiatif ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan rujukan strategis untuk pengembangan program Sekolah Rakyat di masa mendatang, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang lebih sejahtera, cerdas, dan bermartabat.

Pasuruan, 31 Juni 2025

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Selaku Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi
dan Perencanaan TPPS Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sasaran	9
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	14
2.1 Kondisi Geografis dan Administratif	14
2.2 Demografi dan Kependudukan	18
2.3 Ekonomi	25
2.4 Ketenagakerjaan	29
2.5 Kemiskinan	31
2.6 Ketimpangan	32
2.7 Indeks Pembangunan Manusia	34
BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT	36
3.1 Rencana Penyelenggaraan Jangka Pendek Tahun 2025/2026	37
3.2 Rencana Jangka Menengah	39
3.3 Target Sasaran dan Basis Data Rekrutmen	42
3.4 Kurikulum Terintegrasi dan Vokasi (Link and Match)	44
3.5 Struktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	47
BAB IV GAMBARAN KONDISI EKSISTING	53
4.1 Tinjauan Umum Lokasi dan Aksesibilitas	53
4.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Kampus SR 1A (Eks Kantor Bupati)	56
4.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Kampus SR 1C (BLK Rejoso)	64
4.4 Standarisasi Sarana Pendukung Kehidupan Berasrama	72



4.5 Strategi dan Tahapan Pembangunan Fisik Berkelanjutan	73
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Rekomendasi	76

DAFTAR TABEL

1.1	Data Sebaran Anak Tidak Sekolah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	2
2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan	17
2.2	Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan	19
2.3	Kepadatan Penduduk	21
2.4	Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023	22
2.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	23
2.6	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha	27
2.7	Indikator Utama Ketenagakerjaan, 2021-2023 (Kondisi Agustus)	30
2.8	Indikator Kemiskinan Makro, 2021-2023 (Kondisi Maret)	31
2.9	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya, 2023	34

DAFTAR GAMBAR

1.1	Kondisi Infrastruktur Lokasi Sekolah Rakyat (SR 1A & SR 1C) sebagai Wujud Optimalisasi Aset Daerah	4
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan	15
2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023	20
2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	24
2.4	HLS dan RLS Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023	24
2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2023 (%)	26
2.6	Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023	29
2.7	Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	33
2.8	Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	33
3.1	Kepala Sekolah dan Guru SR 1A	51
3.2	Tenaga Pendidik SR 1A	51
3.3	Tenaga Pendidik SR 1A	52
3.4	SK Tim Satuan Tugas SR 1C	52
4.1	Lokasi dan Fasilitas	57
4.2	Laboratorium Komputer	58
4.3	Ruang Kelas	58
4.4	Asrama	59
4.5	Ruang Konseling	60
4.6	UKS	61
4.7	Tempat Cuci Baju	61
4.8	Masjid	62
4.9	Lapangan Upacara	63



4.10	Citra Satelit Lokasi Pembangunan	65
4.11	Ruang Kelas	66
4.12	Ruang Guru	66
4.13	Kamar Asrama Guru	68
4.14	Kamar Asrama Putri Deluxe	68
4.15	Asrama	69
4.16	Kantin	70
4.17	Rekrutmen Siswa	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental dan menjadi fondasi utama dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Dalam konstitusi negara, pendidikan ditempatkan sebagai pilar strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Secara filosofis, pendidikan adalah "jembatan emas" yang menghubungkan individu dari jurang ketidakberdayaan menuju kemandirian ekonomi dan sosial. Namun, dalam realitas empiris yang terjadi di tingkat daerah, idealisme ini seringkali berbenturan dengan tembok tebal kemiskinan struktural. Bagi keluarga yang berada dalam jeratan kemiskinan ekstrem, pendidikan seringkali dipandang sebagai beban ekonomi tambahan alih-alih sebagai investasi masa depan. Paradigma inilah yang kemudian melahirkan siklus kemiskinan antar-generasi yang sulit diputus tanpa adanya intervensi negara yang bersifat radikal, afirmatif, dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Pasuruan, tantangan dalam sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada isu kualitas kurikulum atau kompetensi tenaga pengajar, melainkan pada isu yang jauh lebih mendasar: aksesibilitas. Masih banyak anak-anak usia sekolah yang terpaksa terlempar dari sistem pendidikan formal bukan karena ketidakmampuan intelektual, melainkan karena ketidakberdayaan finansial orang tua. Fenomena ini menciptakan residu pembangunan berupa tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), yang jika dibiarkan, akan menjadi beban demografi di masa depan. Data statistik daerah menunjukkan angka yang memprihatinkan dan menuntut respons cepat dari pemerintah daerah.

Berdasarkan pemetaan data pendidikan terbaru yang dirilis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024, terungkap fakta bahwa persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah ini masih cukup tinggi. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari ribuan harapan anak bangsa yang terancam pupus. Berikut adalah rincian data faktual mengenai kondisi Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pasuruan yang menjadi landasan utama urgensi program ini:

Tabel 1.1 Data Sebaran Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No	Kategori Anak Tidak Sekolah (ATS)	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Drop Out (Putus Sekolah di Tengah Jenjang)	2.884	16,84%
2	Lulus Tidak Melanjutkan (Transisi Jenjang)	7.968	46,53%
3	Belum Pernah Sekolah Sama Sekali	7.076	41,32%
Total	Anak Tidak Sekolah (ATS)	17.124	100% (10,75% dari Populasi)

Sumber: Diolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

Data di atas menunjukkan situasi yang sangat kritis. Total 17.124 anak di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi tidak mengenyam bangku pendidikan. Jika dibedah lebih lanjut, kategori "Lulus Tidak Melanjutkan" mendominasi dengan angka 7.968 anak. Angka ini mengindikasikan bahwa titik rawan putus sekolah terbesar terjadi pada masa transisi (misalnya dari SD ke SMP, atau SMP ke SMA), di mana biaya pendidikan biasanya meningkat signifikan. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah fakta bahwa terdapat 7.076 anak yang "Belum Pernah Sekolah Sama Sekali". Kelompok ini adalah kelompok yang paling rentan (the poorest of the poor), yang kemungkinan besar berasal dari keluarga yang tidak memiliki akses sama sekali terhadap layanan dasar, atau terkendala oleh faktor geografis dan kultural yang ekstrem.

Kondisi ini menegaskan bahwa model sekolah reguler yang ada saat ini meskipun gratis SPP-nya belum cukup ampuh untuk menjangkau kelompok masyarakat miskin ekstrem. Biaya turunan pendidikan seperti seragam, buku, transportasi, uang saku, hingga biaya hidup sehari-hari anak, seringkali menjadi penghalang yang tak tertembus. Dalam banyak kasus di lapangan, anak-anak ini justru didorong untuk bekerja membantu ekonomi keluarga (pekerja anak) daripada bersekolah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari diperlukannya sebuah model intervensi "Jaring Pengaman Sosial" yang tidak hanya menyentuh aspek akademis, tetapi juga menanggung beban biaya hidup anak secara total.

Sebagai respons strategis atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan meluncurkan inisiatif Sekolah Rakyat. Program ini didesain sebagai antitesis dari sekolah konvensional yang kaku. Sekolah Rakyat menawarkan konsep boarding school (sekolah berasrama) yang menanggung seluruh kebutuhan hidup siswa selama 24 jam. Dengan konsep ini, negara hadir mengambil alih tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan secara penuh, sehingga orang tua tidak lagi memiliki alasan ekonomi untuk melarang anaknya bersekolah.

Selain aspek pembiayaan, Sekolah Rakyat juga menawarkan pendekatan kurikulum yang berbeda, yakni "Pendidikan Menyeluruh". Kurikulum ini memadukan standar akademik nasional dengan pembinaan karakter intensif ala pesantren atau pendidikan semi-militer. Tujuannya adalah untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki mental baja, disiplin tinggi, dan keterampilan vokasi yang siap kerja.

Implementasi program ini juga dimanifestasikan melalui optimalisasi aset daerah yang selama ini kurang produktif atau dapat dialihfungsikan untuk nilai manfaat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah telah menetapkan dua lokasi strategis sebagai pilot project, yaitu Eks Kantor Bupati di Jalan Hayam Wuruk (Kode: SR 1A) dan kompleks Balai Latihan Kerja (BLK) Rejoso (Kode: SR 1C). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada analisis efisiensi anggaran dan kecepatan eksekusi. Daripada membangun gedung baru yang memakan waktu tahunan, pemerintah memilih melakukan revitalisasi (rehabilitasi) gedung-gedung aset daerah yang sudah ada agar segera dapat digunakan untuk menampung anak-anak yang membutuhkan.

Lebih jauh, keputusan untuk merevitalisasi aset Eks Kantor Bupati dan BLK Rejoso didasarkan pada kajian aksesibilitas dan kelayakan teknis yang matang. Lokasi Eks Kantor Bupati di Jalan Hayam Wuruk memiliki keunggulan geografis karena berada tepat di jantung kota, dikelilingi oleh fasilitas publik yang memadai, dan sangat mudah dijangkau oleh transportasi umum dari berbagai penjuru wilayah. Hal ini sangat krusial untuk memudahkan mobilitas logistik dan pengawasan program. Sementara itu, kompleks BLK Rejoso dipilih karena memiliki tata letak bangunan yang sejak awal didesain untuk fungsi pelatihan dan hunian (asrama), sehingga konversi fungsinya menjadi sekolah berasrama dapat dilakukan dengan modifikasi minimal namun fungsional. Pemanfaatan kedua aset "tidur" ini tidak hanya menghidupkan

kembali nilai ekonomis bangunan negara, tetapi juga menyulapnya menjadi sentra peradaban baru bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan. Kesiapan fisik bangunan di kedua lokasi ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah daerah bergerak cepat dan taktis dalam merealisasikan program prioritas ini.



Gambar 1.1 Kondisi Infrastruktur Lokasi Sekolah Rakyat (SR 1A & SR 1C) sebagai Wujud Optimalisasi Aset Daerah

Seperti yang terlihat pada ilustrasi di atas, kesiapan infrastruktur menjadi kunci dimulainya operasional Sekolah Rakyat. Di lokasi BLK Rejoso misalnya, rehabilitasi bangunan asrama, ruang kelas, dan fasilitas pendukung lainnya telah dinyatakan selesai 100%. Kesiapan fisik ini paralel dengan persiapan non-fisik seperti rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, dan sosialisasi kepada masyarakat sasaran.

Urgensi penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini semakin relevan jika ditarik ke dalam konteks kebijakan nasional. Program ini merupakan terjemahan langsung di tingkat daerah terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Presiden telah menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan secara permanen. Tanpa

pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin akan mewarisi kemiskinan orang tuanya, menciptakan beban sosial yang terus berulang. Dengan demikian, Sekolah Rakyat bukan sekadar program dinas pendidikan atau dinas sosial semata, melainkan sebuah gerakan kemanusiaan yang dimandatkan oleh negara untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa di Kabupaten Pasuruan.

Secara sosiologis, keberadaan Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu memitigasi dampak negatif dari fenomena anak jalanan dan kenakalan remaja. Anak-anak yang tidak bersekolah memiliki kerentanan tinggi untuk terpapar lingkungan negatif, mulai dari kriminalitas, narkoba, hingga eksploitasi. Dengan menarik mereka masuk ke dalam sistem asrama yang terstruktur dan disiplin, pemerintah daerah sejatinya sedang melakukan investasi keamanan dan ketertiban sosial jangka panjang. Di dalam asrama, pola hidup mereka diatur mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, diisi dengan kegiatan positif, ibadah, olahraga, dan pengembangan soft skills.

Kesimpulannya, latar belakang penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pasuruan didorong oleh "Kedaruratan Sosial" akibat tingginya angka Anak Tidak Sekolah (17.124 jiwa) dan kemiskinan ekstrem. Program ini hadir sebagai solusi komprehensif yang mengintegrasikan fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan dalam satu tarikan napas kebijakan. Melalui sinergi lintas sektor dan dukungan penuh APBD, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi mercusuar harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan menuju daerah yang lebih maju, berkeadilan, dan sejahtera.

1.2 Dasar Hukum

Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan dengan berpedoman pada landasan konstitusional, undang-undang, serta peraturan pelaksana yang berlaku guna menjamin legalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 31 Ayat (1): Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

- b. Pasal 31 Ayat (2): Menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - c. Pasal 34 Ayat (1): Menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - a. Pasal 5 Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - b. Pasal 11 Ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - c. Pasal 34 Ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menetapkan pendidikan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - a. Sebagai pedoman teknis pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - a. Menjadi landasan operasional kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan bagi warga negara usia sekolah.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- a. Menjadi landasan kebijakan strategis nasional yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi pendidikan dan perlindungan sosial terpadu.
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 151/Huk/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial melalui Pendidikan
 - a. Menjadi pedoman teknis pelaksanaan program pendidikan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial, khususnya dalam pengelolaan asrama dan pendampingan psikososial bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
 - a. Sebagai dasar legalitas pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur, operasional asrama, dan biaya pendidikan Sekolah Rakyat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Pasuruan ini dimaksudkan sebagai dokumen strategis yang merepresentasikan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintahan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Secara fundamental, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang utuh, terperinci, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai seluruh ekosistem perencanaan hingga tahap awal implementasi program. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif semata, melainkan juga dimaksudkan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi yang valid bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk mengukur sejauh mana efektivitas intervensi kebijakan yang telah digulirkan. Dengan adanya laporan ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan bermaksud memetakan secara faktual berbagai dinamika lapangan, tantangan teknis, serta capaian progresif dari pembangunan fisik di lokasi Eks Kantor Bupati (SR 1A) dan BLK Rejoso (SR 1C), sehingga dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan yang berbasis data (evidence-based policy) untuk pengembangan program di masa mendatang. Selain

itu, dokumen ini juga dimaksudkan sebagai pedoman operasional dan manajerial bagi Satuan Tugas (Satgas) dan perangkat daerah terkait dalam memastikan bahwa visi besar "Pendidikan Menyeluruh" yang dicanangkan dapat diterjemahkan secara presisi ke dalam tata kelola harian sekolah.

Sejalan dengan maksud tersebut, penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat memiliki tujuan yang bersifat multidimensi dan berjangka panjang. Tujuan yang paling mendasar adalah untuk menjamin pemenuhan hak dasar pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Education for All). Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk hambatan aksesibilitas, baik yang bersifat finansial, geografis, maupun sosial-budaya, yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak terlantar, dan anak jalanan untuk mengenyam bangku sekolah. Melalui program ini, pemerintah bertujuan untuk menerapkan kebijakan "nol penolakan" bagi warga miskin yang ingin bersekolah, dengan menanggung seluruh komponen biaya pendidikan dan biaya hidup secara total (full scholarship), sehingga tidak ada lagi alasan ekonomi yang membenarkan seorang anak di Kabupaten Pasuruan putus sekolah.

Lebih jauh, tujuan strategis dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah sebagai instrumen percepatan pengentasan kemiskinan struktural. Pemerintah menyadari bahwa kemiskinan seringkali merupakan warisan antar-generasi yang sulit diputus hanya dengan bantuan sosial karitatif semata. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk memutus mata rantai tersebut dengan membekali generasi muda dari keluarga prasejahtera dengan modal intelektual dan keterampilan vokasi yang mumpuni. Pendidikan ditempatkan sebagai elevator sosial (social elevator) yang akan mengangkat derajat ekonomi keluarga penerima manfaat di masa depan. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas tinggi yang setara dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya, diharapkan lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing di pasar kerja global atau menciptakan lapangan kerja mandiri, sehingga secara bertahap dapat mengeluarkan keluarganya dari jerat kemiskinan ekstrem sesuai dengan target prioritas nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden.

Selain aspek akademik dan ekonomi, program ini juga memiliki tujuan krusial dalam aspek pembangunan karakter bangsa (nation and character building). Melalui

penerapan konsep sekolah berasrama (boarding school), pemerintah bertujuan untuk membentuk ekosistem pendidikan yang holistik dan protektif. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan anak-anak usia sekolah dari pengaruh negatif lingkungan pergaulan yang destruktif, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan kriminalitas jalanan. Di dalam lingkungan asrama yang terkontrol selama 24 jam, siswa akan dididik dengan nilai-nilai kedisiplinan tinggi, etika, moralitas keagamaan, serta jiwa korsa dan kepemimpinan. Pemerintah bertujuan mencetak profil pelajar yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki ketangguhan mental, integritas moral, dan kemandirian hidup (life skills), sehingga mereka siap tumbuh menjadi agen perubahan yang produktif di tengah masyarakat.

Tujuan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi aset daerah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di lokasi Eks Kantor Bupati di Jalan Hayam Wuruk dan pemanfaatan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) Rejoso bertujuan untuk meningkatkan nilai guna (utility value) aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini kurang produktif. Dengan merevitalisasi gedung-gedung pemerintahan lama menjadi fasilitas pendidikan modern, pemerintah bertujuan melakukan efisiensi anggaran daerah secara signifikan. Strategi ini memungkinkan penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak dan cepat tanpa harus membebani APBD dengan biaya konstruksi gedung baru yang masif dan memakan waktu lama. Langkah ini menegaskan tujuan pemerintah daerah untuk bekerja secara taktis, efisien, dan responsif dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat akan layanan pendidikan, sekaligus menjaga aset negara agar tetap terawat dan bermanfaat bagi pelayanan publik.

1.4 Sasaran

Penetapan sasaran dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat Kabupaten Pasuruan dirumuskan melalui pendekatan afirmasi sosial yang sangat ketat, terukur, dan selektif. Hal ini dilakukan karena program ini tidak didesain untuk menjadi kompetitor bagi satuan pendidikan reguler yang sudah ada, melainkan difungsikan secara spesifik sebagai instrumen "jaring pengaman pendidikan" (educational safety net) bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh sistem. Oleh karena itu, sasaran utama dari program ini adalah segmen populasi yang memiliki

kerentanan ganda, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, yang apabila tidak diberikan intervensi khusus oleh pemerintah, maka mereka dipastikan akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Secara kualitatif, kriteria penerima manfaat yang menjadi prioritas mutlak dalam program ini adalah anak-anak usia sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas, yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin, termasuk mereka yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem. Definisi sasaran ini diperluas untuk mencakup anak-anak yang memiliki latar belakang permasalahan sosial yang kompleks, seperti anak terlantar, anak jalanan, serta anak-anak yang berada dalam lingkungan pengasuhan yang tidak kondusif. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan standar bahwa calon peserta didik Sekolah Rakyat haruslah mereka yang benar-benar tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayai kebutuhan pendidikannya, sehingga intervensi berupa layanan pendidikan gratis berasrama penuh (full boarding) yang mencakup biaya hidup, akomodasi, makan minum, seragam, hingga layanan kesehatan, menjadi solusi yang tepat sasaran dan berdaya guna.

Dalam konteks makro kedaerahan, basis data yang menjadi rujukan utama penetapan target sasaran program ini adalah data populasi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi data pendidikan terkini pada tahun 2024, teridentifikasi sebuah angka yang sangat krusial dan menjadi "kolam sasaran" (target pool) intervensi, yaitu sebanyak 17.124 anak yang saat ini tidak berada dalam bangku sekolah. Angka populasi sasaran yang sangat besar ini kemudian diklasifikasikan lagi menjadi tiga kelompok prioritas penanganan. Kelompok pertama adalah anak-anak yang putus sekolah di tengah jenjang (drop out) yang berjumlah 2.884 anak, yang mana kelompok ini memerlukan strategi re-entry atau penarikan kembali ke sekolah. Kelompok kedua, yang merupakan proporsi terbesar sasaran, adalah anak-anak yang lulus dari jenjang sebelumnya namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (lulus tidak melanjutkan), dengan jumlah mencapai 7.968 anak. Sedangkan kelompok ketiga adalah sasaran yang paling kritis, yaitu anak-anak yang sama sekali belum pernah menyentuh bangku sekolah, yang tercatat sebanyak 7.076 anak.

Mengingat besarnya populasi sasaran tersebut dan keterbatasan kapasitas infrastruktur pada tahap awal, maka implementasi penerimaan peserta didik baru dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas yang ketat. Pada Tahun Ajaran 2025/2026 ini, operasionalisasi Sekolah Rakyat difokuskan pada dua lokasi perintisan utama, yaitu lokasi Sekolah Rakyat 1.A yang menempati Eks Kantor Bupati dan lokasi Sekolah Rakyat 1.C yang menempati fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) Rejoso. Secara operasional, target kuota penerimaan siswa baru ditetapkan berdasarkan ketersediaan ruang kelas dan daya tampung asrama yang telah direhabilitasi.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), sasaran program difokuskan pada anak-anak usia 7 tahun ke atas yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah di kelas awal. Pada tahap perintisan ini, pemerintah menargetkan pembukaan kuota sebanyak 2 (dua) rombongan belajar (Rombel) dengan kapasitas maksimal siswa yang dapat ditampung. Namun, dalam dinamika di lapangan, proses penjangkaran sasaran untuk jenjang SD ini menghadapi tantangan sosiologis tersendiri, di mana seringkali ditemukan kendala berupa ketidaksiapan psikologis orang tua untuk melepaskan anaknya yang masih kecil masuk ke dalam sistem asrama, sehingga realisasi pemenuhan kuota sasaran memerlukan pendekatan persuasif yang lebih intensif.

Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), sasaran program diarahkan kepada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan karena ketiadaan biaya. Sama halnya dengan jenjang SD, pemerintah juga menetapkan target pembukaan kuota sebanyak 2 (dua) rombongan belajar dengan kapasitas total 50 siswa. Sasaran pada jenjang ini dinilai sangat strategis karena usia remaja merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter dan keterampilan kerja, sehingga dengan masuknya mereka ke Sekolah Rakyat, diharapkan mereka dapat diselamatkan dari potensi pengangguran usia muda dan disiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang terampil atau wirausahawan muda yang mandiri. Dengan demikian, akumulasi dari seluruh sasaran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam mengurangi angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pasuruan secara bertahap dari tahun ke tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang utuh, terstruktur, dan komprehensif mengenai alur pikir penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Pasuruan, maka sistematika penulisan laporan ini disusun secara berjenjang dan saling berkesinambungan antar-bab. Penulisan laporan ini tidak hanya sekadar memaparkan data, melainkan membangun sebuah narasi analitis yang dimulai dari pemetaan masalah hingga formulasi solusi kebijakan. Adapun kerangka sistematika penulisan laporan ini dibagi ke dalam lima bab utama, di mana setiap bab memiliki fokus pembahasan spesifik yang saling menguatkan satu sama lain.

Laporan ini diawali dengan BAB I PENDAHULUAN, yang berfungsi sebagai fondasi pemikiran dari seluruh rangkaian laporan. Pada bab ini, diuraikan secara mendalam mengenai latar belakang yang melandasi urgensi penyelenggaraan program, yakni potret krisis akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem dan tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang menuntut intervensi segera. Bab ini juga memuat landasan yuridis yang menjadi payung hukum pelaksanaan program, mulai dari amanat konstitusi hingga regulasi teknis di tingkat daerah, serta menjabarkan maksud, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Selanjutnya, pembahasan akan masuk pada BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH. Bab ini didedikasikan untuk membedah profil kewilayahan Kabupaten Pasuruan sebagai lokus implementasi program. Analisis pada bab ini mencakup pemaparan kondisi geografis dan administratif yang mempengaruhi aksesibilitas layanan, serta analisis demografi dan kependudukan yang menyajikan data tren pertumbuhan penduduk dan struktur umur. Bagian paling krusial dari bab ini adalah analisis profil pendidikan dan tantangan sosial, di mana data statistik mengenai Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan peta sebaran Anak Tidak Sekolah (ATS) akan dikupas tuntas sebagai basis data (baseline data) penentuan kebijakan.

Melangkah ke inti kebijakan, laporan ini menyajikan BAB III KONSEP DAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAKYAT. Bab ini akan menguraikan secara filosofis dan teknis mengenai desain besar (grand design) Sekolah Rakyat. Pembahasan meliputi konsep dasar pendidikan berasrama yang diusung, visi dan misi penyelenggaraan

yang berorientasi pada pembentukan karakter, serta struktur kurikulum yang memadukan aspek akademik dengan keterampilan hidup (life skills). Selain itu, bab ini juga akan mempertegas kriteria sasaran peserta didik dan mekanisme seleksi yang menerapkan prinsip keberpihakan (affirmative action) bagi keluarga prasejahtera.

Bagian yang paling teknis dan faktual akan disajikan dalam BAB IV ANALISIS PENYELENGGARAAN DAN KESIAPAN INFRASTRUKTUR. Bab ini merupakan "jantung" dari laporan yang memotret realitas di lapangan. Di dalamnya akan disajikan analisis mendalam mengenai kesiapan fisik dan sarana prasarana di dua lokasi perintisan, yaitu Sekolah Rakyat 1.A (Eks Kantor Bupati) dan Sekolah Rakyat 1.C (BLK Rejoso). Analisis ini mencakup evaluasi kelayakan gedung asrama, ruang kelas, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain aspek fisik, bab ini juga menganalisis dinamika non-fisik, seperti progres dan kendala dalam proses rekrutmen peserta didik, serta struktur kelembagaan Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk untuk mengawal operasional sekolah.

Terakhir, seluruh rangkaian analisis tersebut akan disimpulkan dalam BAB V PENUTUP. Bab pamungkas ini berisi sintesis kesimpulan utama yang ditarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya, yang menegaskan posisi strategis Sekolah Rakyat dalam peta pembangunan daerah. Bab ini juga akan menyajikan rekomendasi-rekomendasi konstruktif dan solutif yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan, guna perbaikan dan penyempurnaan keberlanjutan program Sekolah Rakyat di masa yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Keberhasilan implementasi kebijakan publik, khususnya yang bersifat afirmatif seperti Program Sekolah Rakyat, sangat bergantung pada akurasi pemahaman terhadap lanskap wilayah yang menjadi arena intervensi. Kabupaten Pasuruan, dengan segala kompleksitas geografis, dinamika demografis, dan tantangan sosial-ekonominya, bukan sekadar ruang administratif semata, melainkan sebuah ekosistem hidup yang mempengaruhi pola aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar pendidikan. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh pada desain teknis program, diperlukan sebuah pemetaan yang komprehensif mengenai kondisi eksisting daerah guna memastikan bahwa strategi yang disusun benar-benar membumi dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.

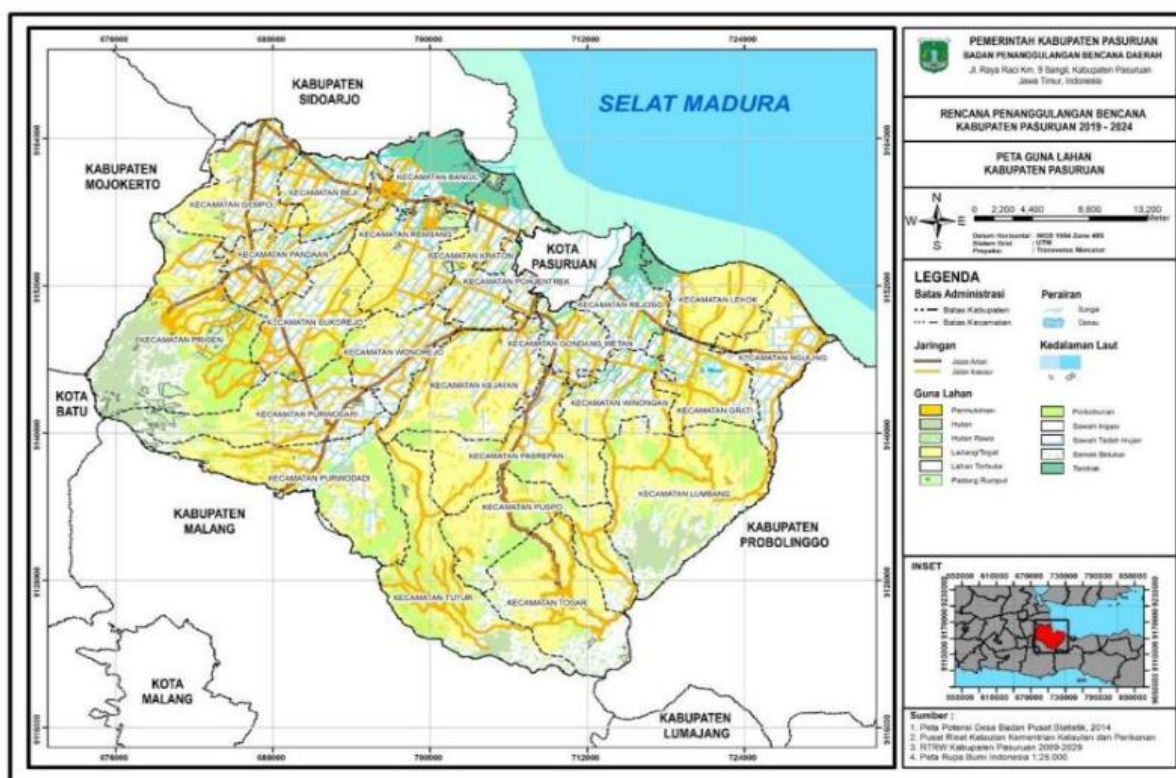
Bab ini didedikasikan untuk mengurai secara mendalam profil wilayah Kabupaten Pasuruan dari berbagai dimensi strategis. Dimulai dari analisis geografis yang menjadi determinan utama dalam penentuan lokasi sekolah dan pola rekrutmen siswa, hingga analisis demografi dan kependudukan yang menyajikan data basis sasaran program. Lebih jauh, bab ini juga akan membedah secara spesifik indikator-indikator pendidikan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan yang menjadi *raison d'être* (alasan keberadaan) dari inisiasi Sekolah Rakyat ini. Pemahaman yang utuh terhadap variabel-variabel makro ini akan menjadi fondasi logis dalam merumuskan kebijakan operasional yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

2.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu entitas wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik fisiografis yang unik dan beragam, membentang dari kawasan pesisir di utara hingga dataran tinggi pegunungan di selatan. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" sampai dengan 7°57'24.32" Lintang Selatan dan 112°34'29.31" sampai dengan 113°06'0.29" Bujur Timur. Posisi geografis ini menempatkan Kabupaten Pasuruan pada jalur konektivitas regional yang vital, namun sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan aksesibilitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan, bagi

penduduk yang bermukim di wilayah-wilayah yang berjauhan dari pusat pemerintahan.

Ditinjau dari aspek teritorial, Kabupaten Pasuruan memiliki batas-batas administratif yang bersinggungan langsung dengan beberapa pusat pertumbuhan ekonomi utama di Jawa Timur. Di sebelah Utara, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan garis pantai Selat Madura yang menjadi basis ekonomi maritim. Di sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo. Di sebelah Selatan, berbatasan dengan wilayah dataran tinggi Kabupaten Malang, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu. Konfigurasi perbatasan ini menegaskan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah penyangga (hinterland) sekaligus pusat aktivitas yang dinamis.



Gambar 2.1 Peta Administratif Wilayah Kabupaten Pasuruan

Visualisasi peta administrasi pada Gambar 2.1 di atas memperlihatkan secara komprehensif konfigurasi kewilayahan Kabupaten Pasuruan yang memiliki rentang kendali cukup lebar. Terlihat jelas pola sebaran wilayah yang memanjang, memisahkan kecamatan-kecamatan di pesisir utara (seperti Lekok, Nguling, Rejoso)

dengan kecamatan di wilayah pegunungan selatan (seperti Tosari, Tuttur, Puspo). Peta ini memberikan perspektif visual mengenai disparitas jarak tempuh (distance gap) yang harus dihadapi oleh masyarakat pinggiran menuju pusat layanan di ibu kota kabupaten. Bagi seorang anak yang tinggal di wilayah ujung timur atau dataran tinggi selatan, mengakses sekolah unggulan yang umumnya terpusat di area perkotaan merupakan tantangan logistik yang berat jika harus ditempuh secara pulang-pergi setiap hari. Oleh karena itu, peta sebaran administratif ini memvalidasi urgensi penerapan sistem zonasi khusus atau model pendidikan berasrama (boarding school) yang diusung oleh Sekolah Rakyat, di mana lokasi sekolah ditempatkan pada titik simpul strategis (seperti di jalur pantura Rejoso dan pusat kota Bangil/Pasuruan) agar mampu mengkover area layanan (catchment area) yang lebih luas dan merata bagi seluruh kecamatan.

Berdasarkan data administratif yang tercatat, luas wilayah daratan Kabupaten Pasuruan mencapai 149.332 Ha. Wilayah yang sangat ekspansif ini secara administratif terbagi ke dalam 24 Kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan. Besarnya cakupan wilayah administrasi ini menjadi variabel determinan yang sangat krusial dalam perencanaan kebijakan pendidikan daerah. Dengan sebaran penduduk miskin dan rentan yang tidak terkonsentrasi di satu titik melainkan tersebar di berbagai pelosok desa mulai dari kawasan pesisir yang padat hingga kantong-kantong permukiman di lereng pegunungan maka akses terhadap fasilitas pendidikan menengah atas yang berkualitas seringkali terkendala oleh faktor jarak tempuh dan minimnya moda transportasi umum yang terjangkau.

Kondisi geografis yang luas dan terpencar (scattered) ini memberikan landasan argumentasi yang kuat dan logis bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengadopsi model Sekolah Berasrama (Boarding School) dalam implementasi Program Sekolah Rakyat. Pilihan model asrama ini bukan sekadar preferensi akademis, melainkan sebuah solusi teknokratis untuk mengatasi hambatan geografis (spatial barrier). Dengan sistem asrama, siswa yang berasal dari kecamatan-kecamatan terjauh atau wilayah terisolir tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi harian yang seringkali menjadi komponen pengeluaran terbesar dan memberatkan bagi keluarga miskin. Negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di pusat pendidikan, sehingga disparitas akses akibat faktor lokasi tempat tinggal dapat dieliminasi sepenuhnya.

Dalam konteks operasionalisasi Sekolah Rakyat tahap awal, pemahaman terhadap struktur wilayah ini juga melandasi pemilihan lokasi perintisan. Penetapan lokasi SR 1A di Eks Kantor Bupati (Jalan Hayam Wuruk) yang berada di pusat kota dan SR 1C di Balai Latihan Kerja (BLK) Rejoso yang terletak di jalur pantura, dinilai sangat strategis. Kedua titik ini berfungsi sebagai "hub" atau simpul konektivitas yang relatif mudah dijangkau dari berbagai penjuru kecamatan di Kabupaten Pasuruan, memudahkan mobilisasi siswa maupun distribusi logistik kebutuhan asrama.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai sebaran luas wilayah administrasi yang menjadi area layanan (catchment area) dari program ini, berikut disajikan data luas daerah menurut kecamatan:

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan		341	24	1.474,02	1 474,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan 2022, Badan Pertanahan Nasional 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2022

Analisis terhadap data kewilayahan ini memberikan kesimpulan awal bahwa tantangan pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berakar pada masalah ekonomi, tetapi juga berkelindan dengan masalah geografis. Oleh karena itu, pendekatan "jemput bola" dan penyediaan fasilitas asrama terpusat di lokasi yang strategis merupakan langkah intervensi yang paling rasional dan efektif untuk menjangkau sasaran program yang tersebar di 149.332 Ha wilayah Kabupaten Pasuruan.

2.2 Demografi dan Kependudukan

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek utama dalam pembangunan daerah. Pemahaman yang komprehensif mengenai struktur, komposisi, dan distribusi penduduk menjadi prasyarat mutlak dalam menyusun perencanaan layanan dasar yang efektif, termasuk di sektor pendidikan. Analisis demografi di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berhenti pada penghitungan jumlah jiwa, melainkan melangkah lebih jauh untuk membedah kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi sasaran program Sekolah Rakyat. Dinamika kependudukan yang fluktuatif, baik karena faktor kelahiran, kematian, maupun migrasi, memberikan gambaran nyata mengenai besarnya beban tanggungan daerah sekaligus potensi "Bonus Demografi" yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat.

Berdasarkan data kependudukan yang dihimpun selama periode empat tahun terakhir (2020–2023), Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang positif. Kenaikan jumlah penduduk ini berimplikasi langsung pada peningkatan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Pada tahun 2023, tercatat jumlah total penduduk Kabupaten Pasuruan telah mencapai angka 1.634.022 jiwa. Angka ini menempatkan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kantong populasi terbesar di Jawa Timur, yang secara inheren menyimpan potensi permasalahan sosial jika tidak diimbangi dengan pelayanan publik yang memadai.

Untuk melihat tren pertumbuhan penduduk secara lebih rinci dari tahun ke tahun, berikut disajikan data perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan:

Tabel 2.2 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022
	➤ Laki-Laki	803.730	808.237	809.968	814.762
	➤ Perempuan	802.239	807.183	809.067	819.260
2	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	1.089,52	1.095,93	1.098,38	1.108,55
3	Sex Ratio (L/P) (%)	100,19	100,13	100,11	99,45
4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur				
	0 - 14 tahun (%)	21,33	22,30	23,21	22,95
	15 - 64 tahun (%)	71,74	70,79	69,94	69,67
	Di atas 65 tahun (%)	6,94	6,92	6,85	7,38

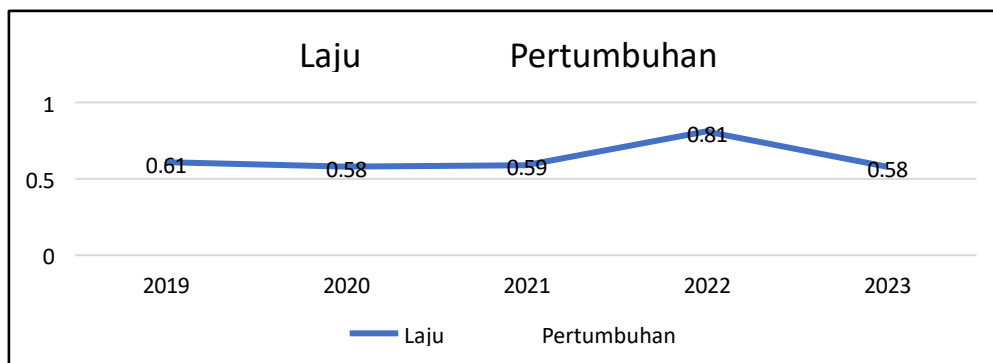
Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Jika dibedah berdasarkan komposisi jenis kelamin (sex ratio), struktur penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan keseimbangan yang dinamis. Data tahun 2023 mencatat bahwa penduduk laki-laki berjumlah 814.762 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 819.260 jiwa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa rasio ketergantungan dan peran gender dalam ekonomi keluarga menjadi sangat krusial. Dalam konteks Sekolah Rakyat, data ini menjadi basis pertimbangan dalam

penentuan kuota asrama putra dan asrama putri, memastikan bahwa fasilitas yang dibangun (seperti yang terlihat pada denah asrama di BLK Rejoso) mampu menampung proporsi siswa laki-laki dan perempuan secara proporsional dan berkeadilan.

Aspek demografi yang paling relevan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah struktur umur penduduk. Analisis terhadap kelompok umur produktif (15-64 tahun) dan usia sekolah (7-18 tahun) memberikan peta jalan bagi pemerintah untuk mengintervensi potensi Anak Tidak Sekolah (ATS). Besarnya proporsi penduduk usia muda di Kabupaten Pasuruan merupakan pedang bermata dua; di satu sisi merupakan peluang emas bonus demografi, namun di sisi lain menjadi bencana demografi jika kelompok usia ini gagal mendapatkan akses pendidikan dan keterampilan.

Visualisasi data kependudukan seringkali lebih mudah dipahami melalui pendekatan grafis. Piramida penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang ekspansif, di mana basis piramida (penduduk usia muda) masih sangat lebar. Hal ini mengonfirmasi bahwa jumlah anak usia sekolah di daerah ini sangat melimpah, dan sebagian di antaranya khususnya dari keluarga miskin memerlukan intervensi negara melalui program Sekolah Rakyat.



Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka

Dari paparan data demografi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang berada pada fase krusial transisi kependudukan. Tingginya jumlah penduduk usia muda menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan "kanal" pendidikan yang inklusif. Tanpa adanya Sekolah Rakyat yang menampung anak-anak dari keluarga miskin, ribuan anak usia produktif ini berisiko menjadi pengangguran

terselubung yang akan membebani perekonomian daerah di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan dan kebijakan pendidikan harus berjalan beriringan dalam satu orkestrasi pembangunan yang harmonis.

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan selama periode 2019-2023 cenderung menunjukkan tren penurunan pada tahun 2019 sampai tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan, kemudian tahun 2023 mengalami penurunan Kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa Program Pengendalian Penduduk sudah berhasil menurunkan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan.

Tingkat kepadatan penduduk ini sangat berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk

No	Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	2019	1.080,09
2	2020	1.089,52
3	2021	1.095,93
4	2022	1.098,38
5	2023	1.108,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Kabupaten Pasuruan tersebar di 24 Kecamatan, dimana jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Gempol dan yang terendah adalah Kecamatan Tosari.

Tabel 2.4 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Purwodadi	69.171	70.015	70.438	70.601	71.345
2	Tutur	52.615	53.743	53.887	53.830	55.107
3	Puspo	26.851	27.722	27.771	27.778	28.164
4	Tosari	34.754	18.799	18.818	18.837	35.879
5	Lumbang	50.778	35.174	35.385	35.464	53.259
6	Pasrepan	64.720	52.396	52.594	52.596	67.235
7	Kejayan	58.847	65.374	65.603	65.589	61.112
8	Wonorejo	84.017	59.864	60.186	60.286	86.266
9	Purwosari	86.746	84.137	84.706	84.962	88.671
10	Prigen	86.967	87.227	87.649	87.745	88.839
11	Sukorejo	110.105	87.477	88.069	88.336	112.299
12	Pandaan	128.871	111.062	111.563	111.651	130.809
13	Gempol	86.474	129.990	130.596	130.719	89.930
14	Beji	84.754	87.022	87.864	88.385	84.241
15	Bangil	65.373	83.307	83.671	83.724	68.840
16	Rembang	86.380	66.711	67.294	67.631	88.535
17	Kraton	30.804	88.525	88.912	88.969	31.436
18	Pohjentrek	56.062	31.296	31.581	31.751	57.339
19	Gondang Wetan	45.137	56.264	56.589	56.705	45.565
20	Rejoso	80.098	46.766	47.036	47.132	80.858
21	Winongan	61.462	44.287	44.569	44.686	63.091
22	Grati	75.279	78.930	79.368	79.512	78.286
23	Lekok	47.368	77.514	78.176	78.551	48.366
24	Nguling	18.454	62.367	63.095	63.595	18.550
Total		1.592.078	1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023**Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)*

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2023 paling banyak berada pada rentang usia 5-9 tahun yaitu sebanyak 131.742 dan usia 10-14 tahun yaitu 131.450 jiwa. Sedangkan usia paling sedikit yaitu usia lansia mulai dari usia 60 tahun keatas. Secara lengkap data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan pada tabel berikut:

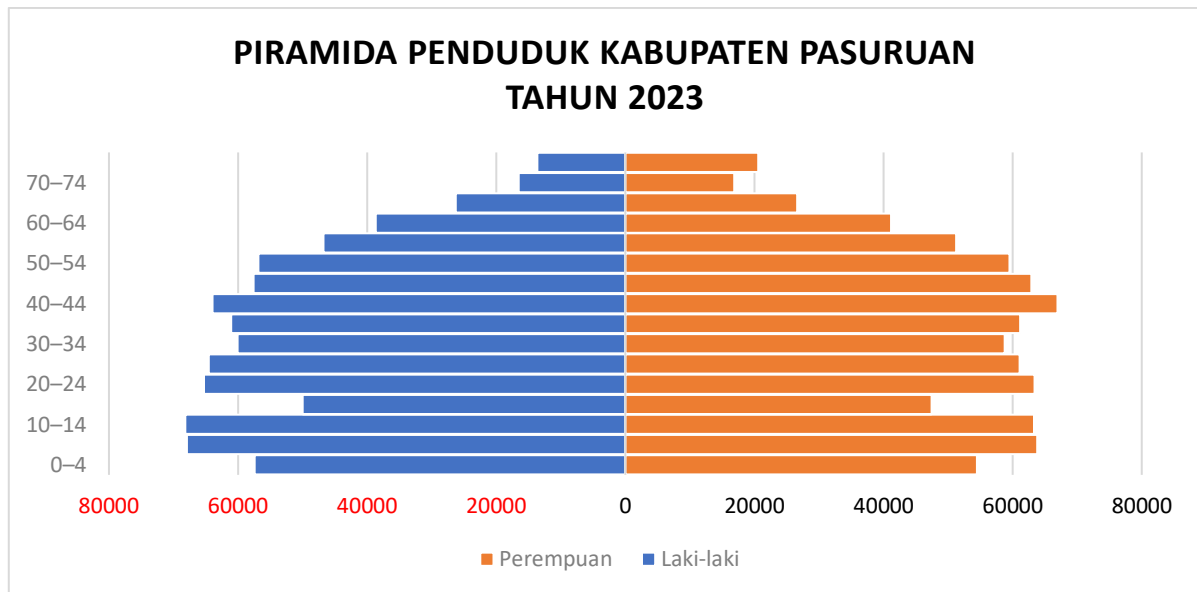
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (jiwa).

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	57.390	54.455	111.845
5–9	67.954	63.770	131.724
10–14	68.140	63.310	131.450
15–19	49.989	47.438	97.427
20–24	65.301	63.411	128.712
25–29	64.532	61.061	125.593
30–34	60.103	58.794	118.897
35–39	61.026	61.163	122.189
40–44	63.923	66.966	130.889
45–49	57.588	62.864	120.452
50–54	56.852	59.522	116.374
55–59	46.808	51.252	98.060
60–64	38.708	41.129	79.837
65–69	26.291	26.643	52.934
70–74	16.499	16.869	33.368
75+	13.658	20.613	34.271
Kabupaten Pasuruan	814.762	819.260	1.634.022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten. Jumlah perempuan lebih besar daripada laki-

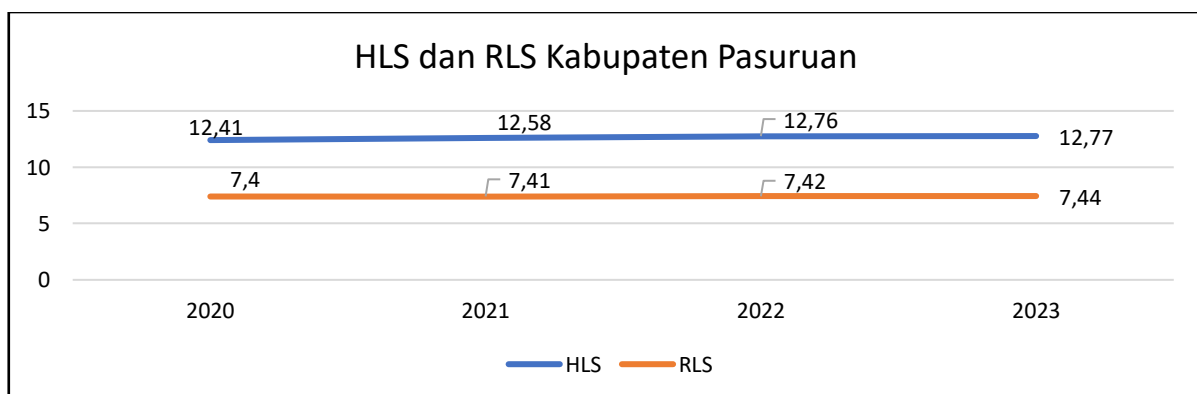
laki yaitu jumlah perempuan adalah sebanyak 814.762 jiwa dan jumlah perempuan adalah sebanyak 819.260 jiwa. Untuk memudahkan membaca data tersebut, maka disajikan dalam bentuk diagram berikut:



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023,
diolah

Berdasarkan gambar tersebut kemudian menjadikan dasar beberapa kebijakan di fokuskan pada peningkatan anak, seperti kebijakan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan tata Kelola pemerintahan yang dirinci dengan proyek strategis. Adapun capaian RLS dan HLS Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian RLS dan HLS meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kabupaten Pasuruan rata-rata meningkat 0,96 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,18 persen per tahun. RLS tahun 2023 meningkat 0,02 tahun (0,27 persen) dibandingkan tahun 2022, naik dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 tahun (0,14 persen). Dalam empat tahun terakhir angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,92% per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 12,76 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/Sederajat.

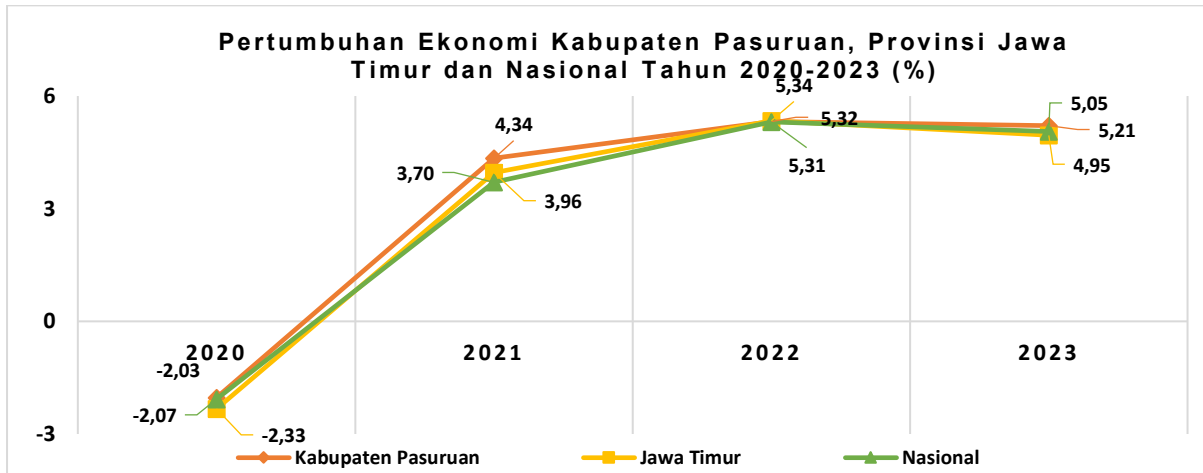
2.3 Ekonomi

Kinerja perekonomian daerah merupakan indikator makro yang vital untuk mengukur kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, sekaligus memotret tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam konteks perencanaan pembangunan manusia, data ekonomi memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk mendukung program-program strategis, termasuk keberlanjutan pendanaan Program Sekolah Rakyat. Indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi Kabupaten Pasuruan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK), serta Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Berdasarkan data indikator ekonomi makro, struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik yang kuat sebagai daerah industri yang ditopang oleh sektor pertanian yang juga signifikan. Selama periode analisis terakhir, nilai PDRB Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan tren positif, yang merefleksikan adanya aktivitas produksi barang dan jasa yang terus berkembang.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari

tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu Tahun 2020-20223. Pada tahun 2021 kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setelah adanya krisis karena Covid-19. Kemudian kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan hingga stabil. Adapun kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2023 (%)

Analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi memperlihatkan dinamika pemulihan dan ekspansi pasca tantangan global beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 5,21. Angka ini mengindikasikan bahwa roda perekonomian daerah bergerak cukup akseleratif. Namun, perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali diiringi oleh tantangan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini relevan dengan urgensi Sekolah Rakyat, di mana meskipun daerah secara agregat kaya (PDRB tinggi), namun masih terdapat kantong-kantong populasi yang tertinggal dan tidak dapat mengakses layanan pasar, termasuk pendidikan berbayar.

Ditinjau dari sisi penawaran (sektoral), struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor Industri Pengolahan. Kontribusi sektor ini sangat dominan dalam pembentukan kue ekonomi daerah. Namun, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap memegang peranan strategis, mengingat sebagian besar basis masyarakat miskin pedesaan menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Fluktuasi di sektor pertanian seringkali berdampak langsung pada kemampuan daya beli masyarakat bawah dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.

Berikut adalah rincian kontribusi sektoral dalam perekonomian Kabupaten Pasuruan:

Tabel 2.6 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha

Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.64	6.78	6.24	6.01	5.92
Pertambangan dan Penggalan	0.55	0.52	0.51	0.50	0.49
Industri Pengolahan	57.68	58.97	60.25	60.42	60.42
Pengadaan Listrik dan Gas	0.85	0.85	0.87	0.87	1.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Konstruksi	12.44	11.94	11.20	11.08	10.75
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.86	9.25	9.59	9.85	9.94
Transportasi dan Pergudangan	0.67	0.65	0.64	0.71	0.78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.00	3.47	3.43	3.58	3.73
Informasi dan Komunikasi	2.63	2.88	2.84	2.72	2.71
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.81	0.83	0.80	0.78	0.76
Real Estate	0.70	0.74	0.70	0.67	0.64
Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.19	1.21	1.10	1.00	0.99
Jasa Pendidikan	0.70	0.73	0.67	0.61	0.60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.15	0.17	0.17	0.16	0.16
Jasa Lainnya	0.99	0.86	0.85	0.89	0.93
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PDRB Tanpa MIGAS	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2023

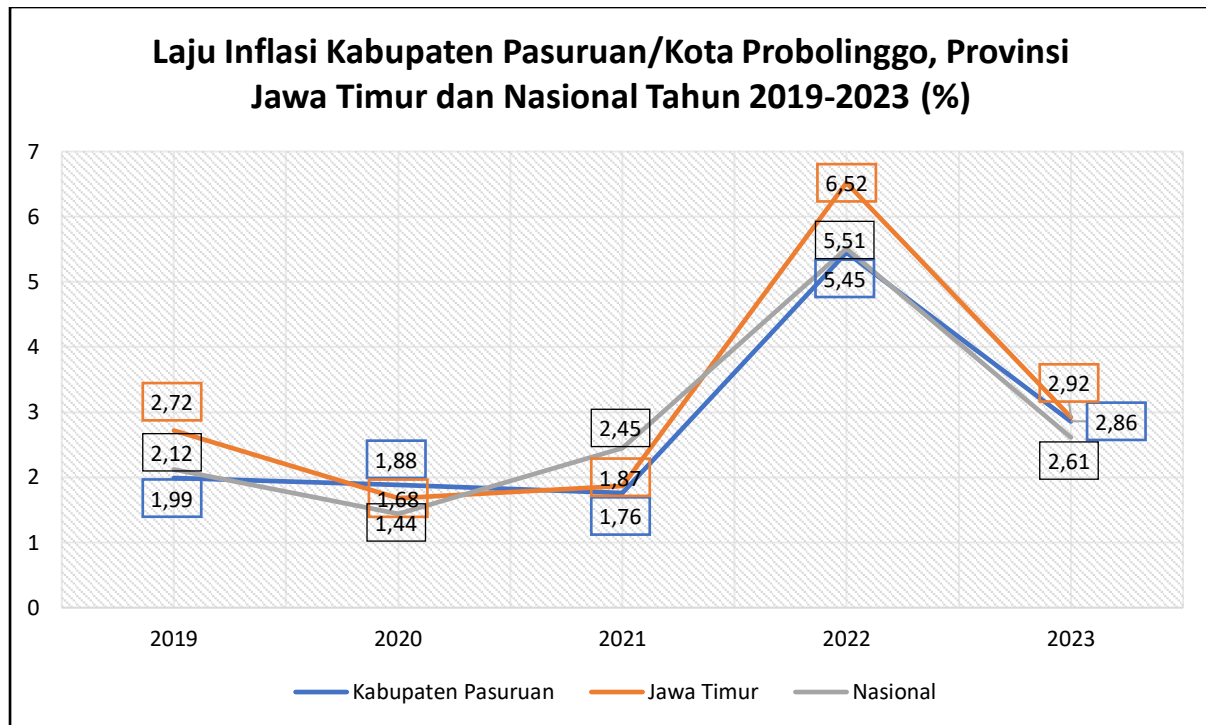
Korelasi antara kondisi ekonomi makro ini dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sangat erat. Tingginya PDRB dari sektor industri menunjukkan bahwa

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar untuk mensubsidi pendidikan bagi warga miskin (subsidi silang). Di sisi lain, fakta bahwa masih banyak keluarga yang bekerja di sektor informal atau pertanian subsisten dengan pendapatan rendah, menegaskan bahwa negara wajib hadir. Program Sekolah Rakyat didesain untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga dengan ekonomi lemah ini tidak tergilas oleh roda industri, melainkan disiapkan untuk menjadi tenaga kerja terampil yang kelak dapat masuk ke sektor-sektor produktif tersebut, sehingga mereka dapat menjadi aktor aktif dalam pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan, bukan sekadar penonton.

Selain indikator pertumbuhan dan struktur PDRB, stabilitas ekonomi daerah juga sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Inflasi, yang didefinisikan sebagai perubahan indeks harga konsumen secara berkelanjutan, merupakan variabel makro yang berdampak langsung terhadap daya beli riil masyarakat. Laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali akan menggerus kemampuan ekonomi rumah tangga, khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memaksa mereka untuk memangkas pengeluaran sekunder, termasuk biaya pendidikan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar.

Berdasarkan data perkembangan harga dalam periode lima tahun terakhir (2019–2023), tren inflasi di Kabupaten Pasuruan (yang diwakili oleh indeks harga Kota Probolinggo sebagai sister city acuan survei biaya hidup terdekat) menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun relatif terkendali. Meskipun secara umum stabilitas harga terjaga, tercatat terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan secara menyeluruh pada tahun 2022, yang dipicu oleh faktor eksternal kenaikan harga energi global. Namun, berkat intervensi kebijakan pengendalian harga yang efektif dari pemerintah daerah dan pusat, kondisi inflasi pada tahun 2023 berhasil ditekan kembali ke level yang stabil. Stabilitas ini penting untuk memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat, meskipun bagi kelompok miskin ekstrem, beban biaya hidup tetaplah berat sehingga intervensi program Sekolah Rakyat tetap menjadi jaring pengaman yang krusial.

Berikut adalah visualisasi perbandingan laju inflasi daerah disandingkan dengan agregat Jawa Timur dan Nasional:



Gambar 2.6 Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.4 Ketenagakerjaan

Pembangunan sektor ketenagakerjaan merupakan dimensi krusial yang berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas yang erat; pendidikan berkualitas bertugas menyuplai tenaga kerja yang kompeten, sedangkan pasar tenaga kerja bertugas menyerap lulusan tersebut untuk menggerakkan roda perekonomian. Dalam kerangka perencanaan Program Sekolah Rakyat, analisis terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menjadi sangat strategis untuk memetakan tantangan "sisi penawaran" (supply side) sumber daya manusia. Data ketenagakerjaan memberikan petunjuk mengenai seberapa besar daya serap pasar kerja daerah, serta mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi (skills gap) yang mungkin menjadi penyebab pengangguran. Hal ini menjadi landasan bagi perumusan kurikulum vokasi di asrama Sekolah Rakyat agar lulusannya kelak relevan dengan kebutuhan industri.

Indikator utama yang digunakan untuk memotret kondisi ketenagakerjaan daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang dirilis Badan Pusat Statistik, dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun terakhir menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi, meskipun tantangan struktural masih tetap ada. TPAK yang merepresentasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi menunjukkan angka yang cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa antusiasme dan ketersediaan suplai tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan sangat melimpah.

Namun, di sisi lain, perhatian khusus harus diberikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Meskipun secara tren angka TPT menunjukkan penurunan dibandingkan puncak masa krisis, namun angka absolut pengangguran khususnya di kalangan lulusan pendidikan menengah masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah daerah. Fenomena pengangguran terdidik ini seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Indikator ketenagakerjaan merefleksikan kapasitas penyerapan tenaga kerja dan tingkat partisipasi ekonomi penduduk usia produktif.

Tabel 2.7 Indikator Utama Ketenagakerjaan, 2021-2023 (Kondisi Agustus)

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Penduduk Usia 15+	Orang	-	-	1.285.630
Angkatan Kerja	Orang	-	-	915.507
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2024

Data menunjukkan peningkatan partisipasi angkatan kerja, di mana TPAK mencapai 71,21% pada Agustus 2023, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini mengindikasikan tingginya minat penduduk untuk masuk ke pasar kerja. TPT menunjukkan tren penurunan yang positif, mencapai 5,48%. Meskipun demikian, angka ini masih berada di atas rata-rata TPT Jawa Timur (4,19%), menandakan bahwa tantangan penciptaan lapangan kerja yang memadai masih menjadi agenda prioritas, khususnya mengingat tingginya laju urbanisasi dan industrialisasi.

Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan menuntut adanya intervensi hulu berupa perbaikan sistem pendidikan bagi masyarakat miskin. Jika anak-anak dari keluarga miskin dibiarkan putus sekolah, mereka hanya akan mengisi pos-pos pekerjaan sektor informal dengan upah rendah, yang pada akhirnya melanggengkan lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, melalui intervensi Sekolah Rakyat, pemerintah memotong siklus tersebut dengan mencetak calon tenaga kerja baru yang berkualitas, yang pada gilirannya akan memperbaiki struktur ketenagakerjaan daerah.

2.5 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan sosial yang paling fundamental. Kabupaten Pasuruan menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan angka yang secara konsisten lebih baik dari rata-rata regional dan nasional.

Tabel 2.8 Indikator Kemiskinan Makro, 2021-2023 (Kondisi Maret)

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin	%	9,70	8,96	9,24
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	159,78	148,62	154,09
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	368.686	394.016	429.624
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	-	1,17	1,29	1,22
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	0,24	0,29	0,26

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2024

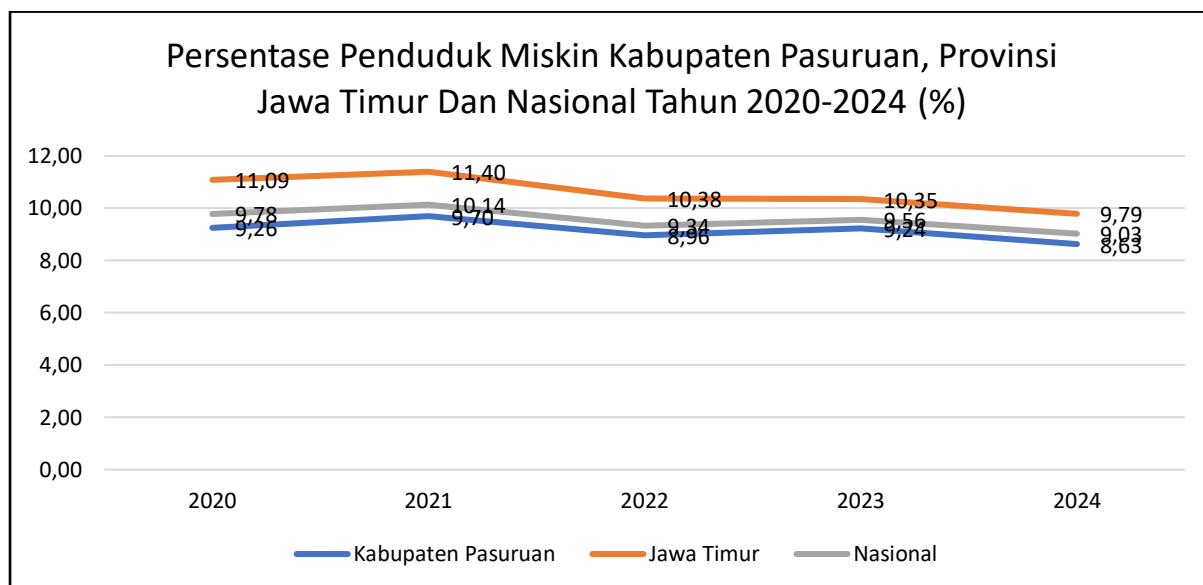
Persentase kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar 9,24%. Angka ini secara konsisten berada di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada angka 1,22 dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) pada angka 0,26 menunjukkan tren perbaikan dari puncak di tahun 2022. Penurunan kedua indeks ini mengimplikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berhasil mengurangi jumlah, tetapi juga mengurangi jurang pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta mengurangi ketimpangan di antara mereka.

2.6 Ketimpangan

Analisis terhadap profil kemiskinan merupakan inti dari seluruh pemetaan kondisi wilayah dalam laporan ini. Data kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari warga negara yang belum dapat menikmati standar hidup layak. Dalam konteks penyelenggaraan Sekolah Rakyat, data kemiskinan menjadi basis utama dalam penentuan target sasaran (targeting) dan lokasi prioritas intervensi. Tingginya angka kemiskinan memiliki korelasi linier dengan tingginya angka putus sekolah; di mana ketidakmampuan ekonomi keluarga menjadi faktor dominan yang memaksa anak-anak untuk meninggalkan bangku sekolah demi membantu menopang ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan menjadi tujuan akhir (ultimate goal) dari program investasi pendidikan ini.

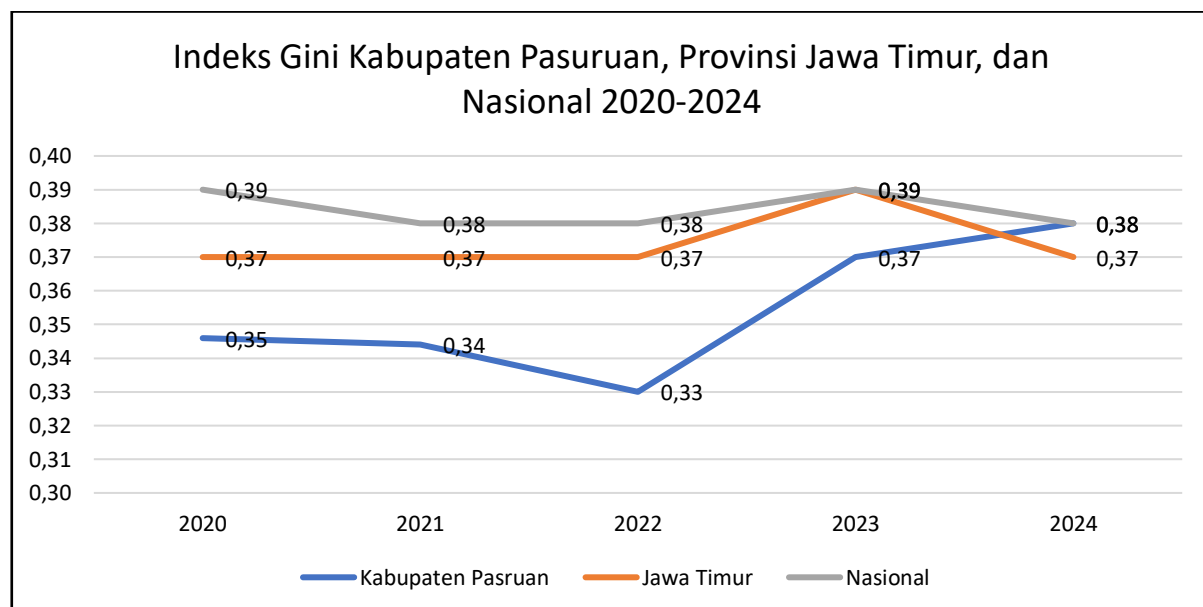
Lebih jauh, analisis kemiskinan tidak cukup hanya melihat jumlah, tetapi juga dimensi kualitas kemiskinan itu sendiri, yang tercermin dalam Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2). Indeks P1 menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah Garis Kemiskinan; semakin tinggi nilainya, semakin sulit mereka untuk diangkat dari kemiskinan (hard to alleviate). Sementara Indeks P2 menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri, yang berarti upaya pengentasan kemiskinan memerlukan intervensi yang lebih spesifik dan terarah, seperti bantuan pendidikan berasrama yang menanggung biaya hidup secara total.

Berikut adalah data perkembangan indikator kemiskinan daerah:



Gambar 2.7 Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Ketimpangan distribusi pendapatan diukur menggunakan Gini Ratio. Kabupaten Pasuruan berhasil menjaga tingkat ketimpangan pada level yang rendah, menunjukkan bahwa pertumbuhannya bersifat relatif inklusif.



Gambar 2.8 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selain kemiskinan makro, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menaruh perhatian khusus pada Kemiskinan Ekstrem. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas nasional. Kelompok miskin ekstrem inilah yang menjadi sasaran "VVIP" dari program Sekolah Rakyat. Mereka adalah kelompok yang tidak hanya miskin secara pendapatan, tetapi juga mengalami deprivasi kapabilitas dasar (kesehatan, pendidikan, air bersih). Tanpa intervensi radikal seperti beasiswa penuh dan asrama, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem ini dipastikan akan mewarisi kemiskinan orang tuanya (intergenerational poverty transfer).

2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang merefleksikan kualitas hidup dari tiga dimensi: kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan), dan ekonomi (standar hidup layak).

Tabel 2.9 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya, 2023

Komponen IPM	Satuan	Capaian 2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,91
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,81
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,46
Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Tahun	11.398

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka & Indikator Makro Sosial Ekonomi 2024

IPM Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 mencapai 72,36, yang mengklasifikasikannya dalam status pembangunan manusia "tinggi". Peningkatan ini didorong oleh perbaikan di seluruh komponennya. UHH mencapai 74,61 tahun, menunjukkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang membaik. Di sektor pendidikan, HLS mencapai 12,78 tahun, yang berarti anak-anak usia sekolah memiliki harapan untuk menamatkan pendidikan hingga jenjang Diploma I. Namun, RLS yang masih berada di angka 7,46 tahun (setara kelas 1 SMP) menjadi tantangan struktural yang signifikan dan menunjukkan adanya gap antara harapan dengan realita partisipasi pendidikan. Meskipun berstatus tinggi, capaian IPM ini masih di bawah

rata-rata IPM Jawa Timur (75,35) dan Nasional (75,02), yang mengindikasikan perlunya upaya akselerasi lebih lanjut dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Meskipun IPM Kabupaten Pasuruan berstatus "tinggi" , tantangan struktural yang signifikan pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih berada di angka 7,46 tahun (setara kelas 1 SMP) memiliki implikasi langsung terhadap upaya penurunan stunting. Tingkat pendidikan, khususnya pada ibu, berkorelasi erat dengan pemahaman mengenai Pola Asuh dan kualitas Konsumsi Gizi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan RLS tidak hanya menjadi target pembangunan manusia, tetapi juga merupakan salah satu agenda intervensi sensitif jangka panjang yang fundamental untuk memutus siklus stunting antar-generasi.

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

Penyelenggaraan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin, marginal, dan rentan sosial tidak dapat lagi didekati dengan cara-cara konvensional, parsial, atau sekadar terjebak dalam rutinitas birokrasi tahunan semata. Tantangan di lapangan menunjukkan bahwa kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh keluarga prasejahtera sangatlah multidimensi; mulai dari ketidakmampuan finansial yang kronis, ketiadaan motivasi berprestasi (*hopelessness*), minimnya dukungan gizi, hingga tekanan lingkungan sosial yang toksik dan tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak. Kondisi objektif ini menuntut adanya sebuah terobosan kebijakan yang bersifat radikal, holistik, dan komprehensif. "Business as usual" atau pendekatan biasa tidak akan pernah cukup untuk mengangkat mereka dari jurang keterpurukan. Berangkat dari kegelisahan akan realitas empiris tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan penuh determinasi melahirkan inovasi kebijakan strategis berupa Program Sekolah Rakyat.

Program ini sejatinya bukan sekadar inisiatif fisik untuk mendirikan bangunan sekolah baru atau menambah ruang kelas semata. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat adalah sebuah manifestasi konkret dari kehadiran negara (*state presence*) yang turun tangan langsung untuk memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi (*intergenerational poverty*) yang selama ini sulit diurai. Melalui instrumen pendidikan yang berkualitas, gratis, dan berkeadilan, pemerintah daerah berupaya menciptakan "eskalator sosial" yang mampu mengantarkan anak-anak dari keluarga termiskin untuk naik kelas, mengubah nasib, dan pada akhirnya mengangkat derajat kesejahteraan keluarganya. Filosofi utamanya adalah keyakinan bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar yang paling bermartabat untuk melawan kemiskinan.

Bab ini akan menguraikan secara mendalam dan terstruktur mengenai rancang bangun (*grand design*) Sekolah Rakyat sebagai sebuah model intervensi sosial-pendidikan yang terpadu. Pembahasan akan diawali dengan membedah filosofi dasar yang melandasi pemilihan konsep sekolah berasrama (*boarding school*). Pilihan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai strategi isolasi positif untuk memisahkan anak dari lingkungan pergaulan yang destruktif, sekaligus memberikan lingkungan inkubasi baru yang disiplin dan religius selama 24 jam penuh. Selanjutnya,

narasi akan bergerak pada penjabaran visi dan misi yang menjadi kompas arah kebijakan, serta detail arsitektur kurikulum yang didesain khusus memadukan akademis, vokasi, dan karakter untuk mencetak lulusan yang tidak hanya pintar, tetapi juga tangguh dan siap kerja.

Selain aspek pedagogis, bab ini juga akan mengupas tuntas mekanisme kelembagaan dan tata kelola manajerial yang akuntabel. Fokus utamanya adalah pada pola rekrutmen peserta didik yang menerapkan prinsip afirmasi super ketat. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah yang digelontorkan benar-benar dinikmati oleh mereka yang secara data (P3KE/DTKS) tergolong miskin ekstrem dan paling membutuhkan, menutup celah bagi salah sasaran. Konsep, strategi, dan kebijakan yang tertuang dalam bab ini disusun untuk menjadi cetak biru (blueprint) operasional yang rigid namun adaptif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di lapangan.

3.1 Rencana Penyelenggaraan Jangka Pendek Tahun 2025/2026

Rencana jangka pendek dalam peta jalan (roadmap) Sekolah Rakyat difokuskan sepenuhnya pada tahap krusial "Perintisan dan Peletakan Fondasi" (Piloting Project). Tahap ini dirancang bukan sekadar sebagai uji coba, melainkan sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh agar Sekolah Rakyat dapat dibuka tepat waktu pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026. Urgensi dari fase ini didorong oleh data faktual mengenai tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pasuruan yang mencapai ribuan jiwa. Kondisi ini menuntut respon cepat dari pemerintah daerah yang tidak bisa ditunda dengan menunggu pembangunan gedung baru yang memakan waktu tahunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan langkah taktis dan pragmatis dengan menerapkan strategi Adaptive Reuse, yaitu memanfaatkan aset-aset daerah yang selama ini berstatus idle (menganggur) atau belum dimanfaatkan secara optimal (under-utilized) untuk disulap menjadi fasilitas pendidikan yang layak huni, layak ajar, dan bermartabat.

Fokus utama alokasi sumber daya pada tahun pertama ini terkonsentrasi pada penyiapan infrastruktur fisik (revitalisasi bangunan) dan pemantapan sistem akademik

di dua lokasi utama yang telah ditetapkan sebagai kampus perintisan. Rincian rencana aksi untuk kedua lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi SR 1A (Kompleks Eks Kantor Bupati - Jl. Hayam Wuruk) Lokasi legendaris ini diproyeksikan sebagai sentra pembelajaran utama bagi jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) atau setara. Mengingat struktur aslinya adalah gedung perkantoran birokrasi, rencana jangka pendek mencakup rekayasa sipil untuk mengalihfungsikan ruangan-ruangan administratif menjadi ruang kelas standar pendidikan dan bangsal asrama siswa. Renovasi difokuskan pada aspek-aspek vital yang mendukung kehidupan asrama 24 jam. Prioritas tertinggi adalah perbaikan dan penambahan fasilitas sanitasi, meliputi pembangunan kamar mandi komunal dan area cuci-jemur dengan rasio yang memadai untuk mencegah antrean panjang. Selain itu, dilakukan penyekatan ruang tidur asrama (dormitory partitioning) dengan zonasi yang ketat untuk memisahkan area asrama putra dan putri, menjamin privasi dan keamanan sesuai norma susila. Infrastruktur pendukung logistik juga disiapkan melalui pembangunan ruang makan (dining hall) yang higienis dan dapur umum skala besar untuk menjamin asupan gizi siswa terjaga dengan baik setiap harinya.
2. Optimalisasi SR 1C (Kompleks Balai Latihan Kerja - BLK Rejoso) Lokasi ini difokuskan secara spesifik untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA) atau pendidikan vokasi, memanfaatkan keunggulan komparatif berupa keberadaan bengkel (workshop) dan peralatan pelatihan kerja standar industri yang sudah tersedia di lokasi. Rencana aksi fisik di lokasi ini meliputi revitalisasi asrama pelatih yang sebelumnya hanya digunakan untuk peserta pelatihan jangka pendek (short course), diubah menjadi asrama siswa yang nyaman untuk hunian jangka panjang. Tantangan utama di lokasi ini adalah sinkronisasi manajemen, sehingga dilakukan integrasi jadwal penggunaan bengkel kerja yang presisi agar tidak terjadi benturan antara peserta pelatihan reguler BLK dengan siswa Sekolah Rakyat. Dengan demikian, siswa mendapatkan akses penuh terhadap fasilitas praktik tanpa mengganggu fungsi utama BLK.

Di luar aspek kesiapan fisik bangunan, rencana jangka pendek tahun 2025/2026 juga mencakup dua pilar non-fisik yang sangat fundamental:

1. Rekrutmen Angkatan Pertama (Quality over Quantity) Pada tahun pertama operasional, target penerimaan siswa baru sengaja dibatasi dalam jumlah yang moderat, yakni sejumlah 4 hingga 6 rombongan belajar dengan estimasi total 100-150 siswa. Pembatasan kuota ini dilakukan demi menjaga rasio ideal pengasuhan dan pembelajaran (teacher-student ratio), sehingga budaya sekolah dan karakter disiplin dapat terbentuk dengan kuat pada angkatan perintis ini. Mekanisme seleksi dilakukan secara tertutup (closed recruitment) dan ketat, dengan basis data tunggal mengacu pada Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Pendekatan ini dipilih untuk meminimalisir intervensi pihak luar dan memastikan bahwa beasiswa pendidikan ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak dari keluarga Desil 1 yang paling membutuhkan.
2. Penguatan Legalitas dan Tata Kelola Kelembagaan Agar operasional sekolah memiliki landasan yuridis yang kokoh dan akuntabel, prioritas utama jangka pendek adalah penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi alokasi anggaran lintas tahun dan struktur organisasi. Tata kelola sekolah dirancang dengan model kolaboratif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menangani kompleksitas kebutuhan siswa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab penuh pada kurikulum dan mutu akademik; Dinas Sosial bertanggung jawab pada validasi data siswa miskin, pemakanan, dan pengasuhan sosial; serta Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam penyediaan instruktur dan fasilitas vokasi. Sinergi regulasi dan kelembagaan ini menjadi kunci keberlanjutan program di masa depan.

3.2 Rencana Jangka Menengah

Setelah fase perintisan (piloting) pada tahun pertama berhasil meletakkan fondasi operasional yang kokoh, penyelenggaraan Sekolah Rakyat akan bertransformasi memasuki fase krusial berikutnya, yaitu "Fase Pengembangan dan Pemanapan" (Scaling Up). Dalam periode jangka menengah ini, orientasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan bergeser secara fundamental; dari yang semula berfokus pada penyediaan akses dasar (access provision), bergerak menuju peningkatan mutu layanan (quality enhancement) dan perluasan daya tampung yang masif. Pada tahap

ini, Sekolah Rakyat tidak lagi dipandang sekadar sebagai program bantuan sosial, melainkan sebagai pusat keunggulan pendidikan daerah. Target utamanya adalah penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) secara signifikan dan terukur, dengan mengintervensi akar masalah kemiskinan struktural melalui pendidikan yang berkelanjutan. Prioritas strategis dalam rencana jangka menengah ini meliputi empat pilar utama:

1. Pembangunan Gedung Permanen dan Terpadu (Kampus Masa Depan) Apabila pada tahap perintisan operasional sekolah masih mengandalkan skema pinjam-pakai aset gedung yang ada (Eks Kantor Bupati dan BLK Rejoso) dengan segala keterbatasan desainnya, maka pada jangka menengah ini Pemerintah Daerah berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang didesain secara khusus (purpose-built) untuk kebutuhan sekolah berasrama modern. Rencana ini mencakup penyusunan Masterplan Kawasan Pendidikan Terpadu yang tidak hanya fungsional tetapi juga ramah lingkungan (Green Campus). Pembangunan fisik akan difokuskan pada penyediaan fasilitas penunjang akademik tingkat lanjut, seperti laboratorium sains terintegrasi, perpustakaan digital (e-library) dengan akses jurnal internasional, serta sarana olahraga indoor dan outdoor yang standar atlet. Selain itu, pembangunan Masjid Sekolah yang representatif akan menjadi prioritas sebagai pusat peradaban dan pembinaan karakter religius siswa. Revitalisasi total ini bertujuan menciptakan lingkungan psikologis yang membanggakan, sehingga siswa dari keluarga miskin tidak merasa minder, melainkan merasa setara dan termotivasi untuk berprestasi.
2. Ekspansi Lokasi dan Replikasi Model (Pemerataan Wilayah) Kabupaten Pasuruan memiliki tantangan geografis yang unik dengan luas wilayah mencapai 149.332 Ha yang membentang dari pesisir hingga pegunungan. Evaluasi awal menunjukkan bahwa layanan yang terpusat di Bangil (SR 1A) dan Rejoso (SR 1C) belum mampu menjangkau secara efektif anak-anak putus sekolah yang berada di wilayah pegunungan selatan dan barat, seperti Tosari, Tuter, Puspo, dan Prigen. Oleh karena itu, rencana jangka menengah mencakup kajian kelayakan (feasibility study) untuk pembukaan unit sekolah baru atau SR Unit Selatan. Strategi ekspansi ini juga tidak harus selalu membangun unit baru, melainkan dapat ditempuh melalui model kolaborasi

Public-Private Partnership (PPP) dengan pesantren-pesantren mitra yang sudah mapan. Dalam skema ini, Pemerintah Daerah membiayai operasional dan standar kurikulum siswa miskin yang dititipkan di pesantren mitra, sehingga daya tampung dapat ditingkatkan secara eksponensial tanpa beban investasi fisik yang terlalu berat, sekaligus memberdayakan ekosistem pendidikan lokal yang sudah ada.

3. Sertifikasi, Akreditasi, dan Jaminan Mutu (Quality Assurance) Fokus pada kuantitas siswa tidak boleh mengorbankan kualitas lulusan. Target ambisius pada fase ini adalah pencapaian Akreditasi A (Unggul) untuk seluruh satuan pendidikan Sekolah Rakyat dari Badan Akreditasi Nasional. Akreditasi ini penting sebagai legitimasi kualitas agar lulusan Sekolah Rakyat dapat bersaing masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun kedinasan. Khusus bagi siswa vokasi di Kampus SR 1C (BLK Rejoso), targetnya lebih spesifik dan berorientasi pasar kerja, yaitu 100% lulusan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Sekolah akan memfasilitasi Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah lisensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Dengan sertifikat ini, lulusan tidak hanya membawa ijazah sekolah, tetapi juga pengakuan legal atas keahlian teknis mereka (seperti las, otomotif, atau kelistrikan), yang menjadi "paspor" untuk menembus persaingan kerja di kawasan industri PIER maupun regional Jawa Timur.
4. Pengembangan Unit Produksi dan Kemandirian (Teaching Factory) Untuk menjamin keberlanjutan program dan mengurangi ketergantungan penuh terhadap APBD dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat akan mengembangkan konsep Teaching Factory (TEFA) yang serius. TEFA bukan sekadar tempat praktik, melainkan unit usaha sekolah yang dijalankan dengan standar industri profesional (industry-standard). Unit bisnis ini akan dikembangkan berbasis potensi lokal Pasuruan. Misalnya, pengembangan Smart Farming dan pengolahan pasca-panen (kopi/buah) untuk unit di wilayah selatan, serta unit jasa perbengkelan modern dan manufaktur suku cadang sederhana untuk unit di wilayah utara/industri. Unit produksi ini dikelola secara kolaboratif oleh guru instruktur dan siswa. Keuntungannya bersifat ganda: siswa mendapatkan pengalaman kewirausahaan nyata (hands-on experience) dan mentalitas bisnis, sementara sekolah mendapatkan omzet atau pendapatan negara bukan

pajak (PNBP) yang dapat digunakan kembali untuk membiayai operasional sekolah (re-invest), menuju kemandirian finansial institusi secara bertahap.

3.3 Target Sasaran dan Basis Data Rekrutmen

Keberhasilan implementasi Program Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh ketepatan dalam membidik kelompok sasaran (targeting accuracy). Mengingat program ini dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan fasilitas asrama dan biaya hidup penuh, maka prinsip efisiensi dan keadilan menjadi parameter utama. Sekolah Rakyat didesain bukan sebagai pesaing bagi sekolah-sekolah reguler yang sudah ada, melainkan sebagai intervensi afirmatif khusus bagi kelompok masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan pendidikan konvensional karena hambatan ekonomi struktural. Oleh karena itu, akurasi data rekrutmen menjadi harga mati untuk menghindari terjadinya inclusion error (masuknya orang yang tidak berhak) dan exclusion error (tercecer/tertinggalnya orang yang justru sangat berhak).

Basis data utama yang menjadi rujukan tunggal dalam penentuan calon peserta didik adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Berbeda dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang cakupannya lebih luas (hingga 40% penduduk terbawah), data P3KE memiliki tingkat kedalaman dan presisi yang lebih spesifik karena telah melalui proses pemadanan data dari berbagai sumber (BKKBN, BPJS, dll). Dalam konteks rekrutmen Sekolah Rakyat, prioritas mutlak penerimaan siswa diberikan kepada keluarga yang masuk dalam kategori Desil 1 P3KE. Kelompok Desil 1 ini merepresentasikan populasi Sangat Miskin/Miskin Ekstrem, yakni kelompok masyarakat yang kondisi kesejahteraannya berada pada 10% terendah secara nasional. Karakteristik kelompok ini umumnya mengalami deprivasi multidimensi: pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan ekstrem, kondisi rumah tidak layak huni, tidak memiliki aset produktif, serta kerentanan tinggi terhadap guncangan ekonomi.

Apabila kuota penerimaan belum terpenuhi dari kelompok Desil 1, maka prioritas selanjutnya dibuka secara bertahap untuk kelompok Desil 2 P3KE (Kelompok Miskin). Namun, perlu ditegaskan bahwa seleksi bagi Desil 2 akan dilakukan dengan verifikasi yang jauh lebih ketat untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-

benar jatuh kepada mereka yang membutuhkan. Selain data kemiskinan, irisan data kedua yang digunakan adalah Data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan hasil pendataan SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) di tingkat desa. Sekolah Rakyat menargetkan anak-anak dalam rentang usia sekolah (13-15 tahun untuk SMP dan 16-18 tahun untuk SMA) yang berstatus putus sekolah (drop out) atau lulus namun tidak melanjutkan (lulus tidak melanjutkan) karena alasan biaya.

Mekanisme rekrutmen peserta didik Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan yang radikal dan berbeda dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) reguler. Jika PPDB reguler bersifat Pasif (menunggu siswa mendaftar secara mandiri/online), maka Sekolah Rakyat bersifat Aktif-Partisipatif (Jemput Bola). Pemerintah daerah menyadari bahwa keluarga miskin ekstrem seringkali memiliki keterbatasan akses informasi, teknologi, bahkan motivasi untuk mendaftarkan anaknya. Oleh karena itu, proses rekrutmen dilakukan melalui tahapan berjenjang yang melibatkan sinergi lintas sektor sebagai berikut:

1. Tahap Penjaringan Data Awal (Desk Research): Dinas Sosial bersama Bappelitbangda melakukan penarikan data P3KE Desil 1 dan menyandingkannya dengan data kependudukan (Dispendukcapil) untuk menyaring keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Hasil penyaringan ini menghasilkan "Daftar Nominatif Sementara" calon siswa potensial per kecamatan.
2. Tahap Verifikasi dan Validasi Lapangan (Home Visit): Daftar nominatif tersebut kemudian diturunkan kepada Tim Verifikator Lapangan yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta perangkat desa setempat. Tim ini wajib melakukan kunjungan rumah (home visit) ke setiap alamat calon siswa. Tujuannya adalah melakukan Verifikasi Faktual terhadap kondisi riil ekonomi keluarga. Indikator yang dinilai meliputi: kondisi fisik rumah (lantai, dinding, atap), kepemilikan aset (kendaraan bermotor, ternak, lahan), akses sanitasi, serta daya listrik. Tahap ini merupakan "filter" terpenting untuk mencoret calon siswa yang ternyata mampu secara ekonomi namun datanya masih tercatat miskin (meminimalisir data error).

3. Tahap Asesmen Motivasi dan Komitmen: Selain kondisi ekonomi, tim juga melakukan wawancara mendalam dengan orang tua dan calon anak. Mengingat sistem pendidikan berbasis asrama (boarding) menuntut kedisiplinan dan kemandirian tinggi, calon siswa harus memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk belajar. Asesmen ini juga sekaligus memetakan potensi masalah sosial yang mungkin dibawa anak, seperti riwayat kenakalan remaja atau trauma keluarga, agar dapat disiapkan pendampingan psikologis yang tepat jika mereka diterima.
4. Tahap Penetapan Akhir: Hasil verifikasi lapangan dan asesmen kemudian direkapitulasi dan disidangkan dalam forum lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penetapan siswa yang lolos seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, kemudian disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan.

Selain kriteria ekonomi dan status ATS, Sekolah Rakyat juga memberikan porsi afirmasi khusus bagi anak-anak dengan kondisi kerentanan sosial tertentu, yakni Anak Yatim Piatu, Anak Terlantar, dan anak-anak yang berada dalam pengasuhan panti sosial namun tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Bagi kelompok ini, persyaratan administrasi kependudukan dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh pemerintah daerah jika terjadi kendala (misalnya tidak memiliki Akta Kelahiran), sejalan dengan prinsip Education for All dan hak konstitusional warga negara.

Dengan mekanisme penargetan yang berlapis dan ketat ini (mulai dari data makro P3KE hingga verifikasi mikro door-to-door), Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjamin bahwa setiap kursi belajar dan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat benar-benar dinikmati oleh "anak-anak emas" yang paling membutuhkan, memotong rantai kemiskinan keluarga mereka, dan mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Pasuruan di masa depan.

3.4 Kurikulum Terintegrasi dan Vokasi (Link and Match)

Jantung dari keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada desain kurikulumnya yang inovatif dan komprehensif. Menyadari bahwa input siswa berasal dari kelompok masyarakat rentan dengan latar belakang akademis yang beragam (termasuk Anak Tidak Sekolah/ATS), Sekolah Rakyat tidak dapat sekadar mengadopsi kurikulum

sekolah reguler mentah-mentah. Diperlukan pendekatan kurikulum adaptif yang tidak hanya mengejar ketuntasan akademis semata, melainkan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) dan kesiapan kerja (employability). Oleh karena itu, Sekolah Rakyat menerapkan model "Kurikulum Tiga Pilar" yang mengintegrasikan secara harmonis antara: (1) Kurikulum Akademik Nasional, (2) Kurikulum Vokasi/Keterampilan Berbasis BLK, dan (3) Kurikulum Pengasuhan Asrama (Karakter).

1. Pilar Akademik: Kurikulum Merdeka dengan Pendekatan Pemulihan Pembelajaran Sebagai satuan pendidikan formal, Sekolah Rakyat tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan menggunakan Kurikulum Merdeka. Namun, implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mengingat sebagian besar siswa memiliki riwayat putus sekolah atau learning loss, pada semester awal diterapkan Program Matrikulasi Intensif. Program ini fokus pada penguatan literasi (kemampuan memahami teks) dan numerasi (logika matematika dasar) untuk mengejar ketertinggalan, sehingga siswa memiliki fondasi yang kokoh sebelum masuk ke materi yang lebih kompleks. Metode pembelajaran di kelas tidak didominasi oleh ceramah satu arah, melainkan menggunakan pendekatan Project Based Learning (PjBL). Siswa diajak memecahkan masalah nyata di lingkungan sekitarnya. Misalnya, pelajaran Matematika dan Fisika diintegrasikan dengan perhitungan bahan di bengkel las, atau pelajaran Biologi dan Kimia diintegrasikan dengan pengolahan limbah pertanian. Dengan cara ini, siswa memahami relevansi ilmu pengetahuan dengan kehidupan nyata, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi belajar mereka secara intrinsik.
2. Pilar Vokasi: Integrasi Total dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Ini adalah unique selling point utama Sekolah Rakyat, khususnya pada jenjang menengah atas yang berlokasi di SR 1C (Kompleks BLK Rejoso). Kurikulum vokasi didesain dengan prinsip "Link and Match" yang ketat dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Kabupaten Pasuruan. Mengingat Kabupaten Pasuruan adalah wilayah industri strategis (memiliki kawasan PIER dan dikelilingi ribuan pabrik), kurikulum vokasi difokuskan untuk mencetak tenaga kerja terampil pada sektor-sektor prioritas.

Siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi menjalani pelatihan praktik di workshop BLK dengan standar peralatan industri. Kompetensi keahlian yang ditawarkan meliputi:

- a. Teknik Manufaktur dan Pengelasan (Welding): Siswa dilatih menguasai teknik las SMAW, GMAW, hingga GTAW yang sangat dibutuhkan oleh industri konstruksi dan perkapalan. Targetnya, lulusan memiliki sertifikasi pengelasan minimal level dasar hingga madya.
- b. Teknik Otomotif: Fokus pada perawatan dan perbaikan kendaraan ringan serta sepeda motor, mencakup sistem injeksi elektronik terkini. Ini membekali siswa kemampuan untuk bekerja di bengkel resmi maupun membuka wirausaha bengkel mandiri.
- c. Agroindustri dan Tata Boga: Memanfaatkan potensi pertanian Pasuruan, siswa diajarkan teknik pengolahan hasil pertanian (food processing) menjadi produk bernilai tambah, serta manajemen usaha kuliner yang higienis dan modern.
- d. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Pembekalan skills digital praktis seperti desain grafis, digital marketing, dan administrasi perkantoran modern untuk menjawab kebutuhan ekonomi digital.

Puncak dari pembelajaran vokasi ini adalah Uji Kompetensi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Target mutlak dari Sekolah Rakyat adalah: setiap lulusan memegang dua dokumen saat wisuda, yaitu Ijazah Sekolah dan Sertifikat Kompetensi BNSP. Sertifikat inilah yang akan menjadi "paspor" mereka untuk menembus pasar kerja dan memutus rantai kemiskinan keluarga.

1. Pilar Pengasuhan: Kurikulum Asrama Berbasis Karakter dan Kemandirian Pendidikan di Sekolah Rakyat berlangsung 24 jam. Asrama bukan sekadar tempat tidur, melainkan "laboratorium karakter". Kurikulum pengasuhan didesain untuk merombak mentalitas siswa dari mentalitas "penerima bantuan" menjadi mentalitas "pemenang".

- a. Bina Pribadi dan Spiritual: Rutinitas ibadah wajib berjamaah, pembiasaan tilawah Al-Qur'an, dan kajian adab/akhlak menjadi menu harian untuk membangun integritas moral. Kejujuran dan tanggung jawab adalah nilai yang tidak bisa ditawar.
- b. Kecakapan Hidup (Life Skills) & Work Habit: Siswa dilatih untuk mandiri mengurus kebutuhan pribadinya (mencuci, menyetrika, membersihkan kamar) tanpa bantuan orang tua atau asisten. Lebih jauh, budaya industri seperti "5R" (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan tidak hanya di bengkel, tetapi juga dalam tata kelola asrama. Hal ini bertujuan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki etos kerja (work habit) yang disiplin, tangguh, dan siap beradaptasi dengan ritme dunia kerja yang keras.
- c. Kepemimpinan dan Kewirausahaan: Melalui organisasi siswa intra sekolah dan unit usaha sekolah (Teaching Factory), siswa dilatih berorganisasi, mengambil keputusan, dan mengelola unit bisnis kecil.

Dengan integrasi ketiga pilar kurikulum tersebut, Sekolah Rakyat menawarkan paket pendidikan paripurna. Siswa yang masuk dengan latar belakang keterbatasan ekonomi dan sosial, akan diproses dalam "kawah candradimuka" ini selama 3 tahun, untuk kemudian lahir kembali sebagai lulusan yang: Otaknya Cerdas (Akademik), Tangannya Terampil (Vokasi), dan Hatinya Mulia (Karakter). Inilah definisi sesungguhnya dari SDM unggul yang menjadi tujuan akhir pembangunan daerah.

3.5 Struktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kompleksitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang menggabungkan fungsi pendidikan formal, fungsi pengasuhan sosial, dan fungsi pelatihan vokasi menuntut model tata kelola kelembagaan yang tidak konvensional. Sekolah Rakyat tidak bisa hanya dikelola secara tunggal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selayaknya sekolah negeri biasa. Diperlukan struktur kelembagaan yang bersifat Kolaboratif dan Lintas Sektoral (Cross-Functional Governance) di bawah komando langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Tim Pengarah. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap dimensi kebutuhan siswa (akademik, logistik, mental, dan keterampilan) tertangani oleh ahlinya masing-masing.

1. Model Tata Kelola Lintas Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk Gugus Tugas (Task Force) Pengelola Sekolah Rakyat yang mengikat sinergi antara tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama sebagai pilar penyangga, dengan pembagian tugas dan kewenangan yang spesifik sebagai berikut:

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Leading Sector): Bertindak sebagai penanggung jawab utama aspek akademis dan administratif kependidikan.
 - Tanggung Jawab: Menyediakan izin operasional sekolah, menerbitkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), menyusun kalender akademik, menyediakan tenaga pendidik (guru mata pelajaran), serta melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum pembelajaran. Dinas Pendidikan juga bertanggung jawab memastikan siswa terdaftar dalam Dapodik agar sekolah menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat sebagai pendamping APBD.
- c. Dinas Sosial: Bertindak sebagai penanggung jawab aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial siswa.
 - Tanggung Jawab: Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan (P3KE) saat rekrutmen, mengelola anggaran permakanan (konsumsi) siswa di asrama, menyediakan seragam dan perlengkapan mandi, serta memberikan layanan pendampingan psikososial. Pekerja Sosial (Peksos) akan dilibatkan secara berkala untuk menangani siswa yang mengalami masalah adaptasi atau gangguan emosional akibat latar belakang keluarga.
- d. Dinas Tenaga Kerja (UPT Balai Latihan Kerja): Bertindak sebagai penanggung jawab aspek kompetensi teknis dan keahlian vokasi (khususnya untuk jenjang menengah/SR 1C).
 - Tanggung Jawab: Menyediakan infrastruktur bengkel (workshop), menyusun kurikulum pelatihan berbasis industri, menyediakan

instruktur ahli, serta memfasilitasi program magang dan penempatan kerja bagi lulusan.

Selain tiga pilar utama tersebut, kelembagaan juga didukung oleh Dinas Kesehatan (melalui Puskesmas terdekat) untuk layanan kesehatan berkala siswa (Poskestren), serta unsur TNI/Polri dalam pembinaan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan.

2. Profil dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan kurikulum dan program sekolah sangat bergantung pada "The Man Behind The Gun". Mengingat karakteristik siswa Sekolah Rakyat yang unik (berasal dari keluarga rentan, risiko putus sekolah, dan potensi trauma), maka SDM yang direkrut harus memiliki kualifikasi khusus. Mereka tidak hanya dituntut kompeten secara profesional, tetapi juga harus memiliki Jiwa Pengabdian Sosial (Social Passion) yang tinggi.

Berikut adalah spesifikasi SDM yang akan mengawaki Sekolah Rakyat:

- a. Kepala Sekolah: Seorang pemimpin visioner dan manajerial yang mampu mengorkestrasi berbagai kepentingan. Kualifikasi yang dicari adalah figur yang memiliki rekam jejak dalam pengelolaan sekolah berasrama (boarding school) atau pendidikan vokasi, serta memiliki kemampuan komunikasi persuasif untuk menjalin kemitraan dengan dunia industri.
- b. Tenaga Pendidik (Guru Akademik): Guru yang dipilih bukan hanya yang pandai mengajar, tetapi guru yang sabar dan adaptif (Adaptive Teacher). Mereka harus menguasai metode pembelajaran berdiferensiasi untuk menangani siswa dengan kemampuan beragam. Guru Sekolah Rakyat wajib memiliki perspektif "Guru Sahabat Siswa" untuk menghilangkan jarak dan membangun kepercayaan diri siswa yang sempat minder karena kemiskinan.
- c. Instruktur Vokasi: Tenaga profesional praktisi yang memiliki sertifikat kompetensi metodologi dan teknis. Mereka bertugas mentransfer tacit knowledge dan budaya kerja industri kepada siswa. Instruktur ini bisa berasal dari instruktur tetap BLK maupun praktisi industri yang diundang (guest lecturer).

- d. Pamong Pengasuh (Musyrif/Musyrifah): Ini adalah ujung tombak pendidikan karakter. Pamong bertugas selama 24 jam di asrama sebagai pengganti orang tua (surrogate parents).
 - Tugas: Membangunkan siswa sholat subuh, mengawasi kebersihan kamar, mendampingi belajar malam, hingga menjadi tempat curhat siswa.
 - Kualifikasi: Diutamakan lulusan sarjana muda yang memiliki latar belakang kepesantrenan atau pendidikan konseling, memiliki fisik yang prima, dan integritas moral yang teruji. Rasio ideal pamong adalah 1 pamong mengasuh 15-20 siswa untuk menjamin pengawasan yang efektif.
- e. Tenaga Pendukung (Psikolog & Konselor): Mengingat latar belakang siswa yang rentan (fragile), keberadaan psikolog atau guru BK (Bimbingan Konseling) sangat vital. Mereka bertugas mendeteksi dini masalah kesehatan mental dan memberikan terapi kelompok maupun individu agar siswa dapat belajar dengan tenang tanpa beban trauma masa lalu.

2. Pengembangan Kapasitas SDM (Capacity Building)

Sebelum sekolah beroperasi, seluruh SDM terpilih wajib mengikuti pelatihan pra-tugas (pre-service training). Materi pelatihan mencakup:

- a. Trauma-Informed Teaching: Cara mengajar anak-anak yang memiliki latar belakang trauma.
- b. Positive Discipline: Penerapan disiplin tanpa kekerasan.
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Asrama dan Penanganan Darurat.

Dengan struktur kelembagaan yang kokoh dan SDM yang terpilih secara ketat, Sekolah Rakyat Kabupaten Pasuruan dirancang bukan sekadar sebagai gedung sekolah, melainkan sebagai Ekosistem Transformasi Manusia yang mampu mengubah beban demografi menjadi bonus demografi yang produktif.



Sekolah Rakyat 3 Kab Pasuruan

Gambar 3.1 Kepala Sekolah dan Guru SR 1A



Sekolah Rakyat 3 Kab Pasuruan

Gambar 3.2 Tenaga Pendidik SR 1A



TENAGA PENDIDIK



Sekolah Rakyat 3 Kota Pasuruan

Gambar 3.3 Tenaga Pendidik SR 1A

LAMPIRAN : SK TIM SATUAN TUGAS SR KAB. PASURUAN
NOMOR : 300.2.5.1/ /HK/424.013/2025
TANGGAL : AGUSTUS 2025

TIM SATUAN TUGAS SEKOLAH RAKYAT KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	PENGARAH	BUPATI PASURUAN
2.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH
3.	WAKIL KETUA	BAPPELITBANGDA
4.	KOORDINATOR SATUAN TUGAS	DINAS SOSIAL
5.	ANGGOTA SATUAN TUGAS	- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS KESEHATAN

Gambar 3.4 SK Tim Satuan Tugas SR 1C

BAB IV

GAMBARAN KONDISI EKSISTING

4.1 Tinjauan Umum Lokasi dan Aksesibilitas

Pemilihan lokasi untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat didasarkan pada keputusan strategis dan visioner Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menerapkan prinsip Smart Asset Management melalui revitalisasi aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal (*under-utilized assets*). Langkah kebijakan ini diambil bukan semata-mata sebagai upaya efisiensi anggaran dalam pos belanja modal pengadaan tanah, melainkan juga sebagai strategi akselerasi untuk mempercepat realisasi program tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi pembebasan lahan baru yang seringkali memakan waktu tahunan dan berisiko menimbulkan konflik sosial. Dengan mengadopsi konsep *adaptive reuse* atau penggunaan kembali bangunan lama untuk fungsi baru, pemerintah daerah dapat mengalihkan fokus anggaran sepenuhnya pada peningkatan kualitas infrastruktur interior dan fasilitas pembelajaran, memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung pada kesejahteraan siswa.

Dua lokasi utama yang akhirnya ditetapkan sebagai kampus perintisan, yakni Kampus SR 1A dan Kampus SR 1C, memiliki karakteristik geografis yang sangat *distingtif* namun saling melengkapi dalam satu kesatuan ekosistem pendidikan daerah. Lokasi pertama adalah Kampus SR 1A yang menempati kompleks prestisius Eks Kantor Bupati di Jalan Hayam Wuruk, sebuah situs yang memiliki nilai historis administratif. Sementara lokasi kedua adalah Kampus SR 1C yang terintegrasi langsung dengan fasilitas pelatihan teknis di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) di wilayah Rejoso. Penetapan kedua titik ini telah melalui kajian kelayakan yang matang (*feasibility study*), tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas, tetapi juga membedah aspek aksesibilitas makro dan mikro yang mendukung spesifikasi fungsi pendidikan yang berbeda antara pendidikan umum berbasis akademik dan pendidikan vokasi berbasis keterampilan.

Kampus SR 1A di Jalan Hayam Wuruk memiliki keunggulan komparatif yang tak tergantikan karena letaknya yang berada tepat di jantung kota atau pusat pemerintahan lama. Posisi ini memberikan keunggulan aksesibilitas yang sangat prima terhadap berbagai jaringan fasilitas publik vital yang mutlak dibutuhkan untuk

operasional sekolah berasrama berskala besar. Kedekatannya dengan pusat layanan kesehatan rujukan utama, yakni RSUD dr. R. Soedarsono, memberikan jaminan keamanan medis yang krusial bagi ratusan siswa yang tinggal di asrama. Dalam manajemen asrama, akses cepat ke rumah sakit adalah variabel keamanan utama untuk mitigasi risiko kedaruratan kesehatan siswa. Selain itu, akses yang dekat dengan Alun-alun Kota serta pusat administrasi pemerintahan menjadikan lokasi ini sangat ideal untuk memudahkan fungsi pemantauan rutin, koordinasi lintas instansi, dan kelancaran arus logistik harian, seperti suplai katering dan kebutuhan operasional lainnya yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Lebih jauh menelisik kondisi lingkungan mikronya, meskipun Kampus SR 1A secara fisik berada di tengah hiruk-pikuk perkotaan yang padat dengan dinamika lalu lintas yang tinggi, kompleks ini memiliki keunggulan infrastruktur pertahanan berupa pagar keliling (perimeter walls) yang kokoh, tinggi, dan tertutup rapat. Keberadaan benteng fisik ini mampu menciptakan sebuah zona eksklusif (educational enclave) yang aman, steril, dan kondusif di tengah kota. Hal ini memungkinkan penerapan sistem asrama tertutup yang efektif, memisahkan siswa dari pengaruh negatif pergaulan bebas perkotaan. Tantangan utama di lokasi urban ini hanyalah perlunya rekayasa lingkungan untuk meredam kebisingan kota (noise pollution) agar tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa. Namun, hal ini telah diantisipasi dengan strategi penataan ruang (zoning) yang cerdas, seperti penempatan blok asrama di area belakang yang lebih hening serta pembuatan buffer zone atau sabuk hijau vegetasi di area depan untuk menyerap polusi suara dan debu jalanan.

Berbeda secara diametral dengan lokasi pertama, Kampus SR 1C di Rejoso menawarkan atmosfer lingkungan yang kental dengan nuansa industri dan keteknikan. Secara geospasial, letaknya sangat strategis karena berada di koridor jalur utama Pantai Utara (Pantura) yang merupakan urat nadi ekonomi Jawa Timur. Lokasi ini juga berdekatan dengan akses gerbang tol Pasuruan-Probolinggo serta kawasan industri utama Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Konektivitas regional yang sangat terbuka ini menjadikan Kampus SR 1C sangat representatif untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi atau kejuruan. Posisi ini menempatkan sekolah langsung di dalam "habitat" ekosistem industri, yang secara psikologis akan membentuk mindset kerja siswa sejak dini. Selain itu, kedekatan fisik dengan kawasan industri memudahkan akses bagi mitra perusahaan untuk melakukan kunjungan,

mengirimkan instruktur tamu, maupun menyalurkan bantuan peralatan praktik melalui program CSR.

Dari perspektif tata ruang lingkungan, kondisi fisik di BLK Rejoso relatif lebih luas, lapang, dan terbuka jika dibandingkan dengan kepadatan bangunan di Hayam Wuruk. Ketersediaan lahan terbuka yang masif ini memberikan ruang yang cukup leluasa untuk aktivitas fisik siswa, manuver praktik penggunaan alat berat, hingga pengembangan sarana olahraga lapangan luar ruang yang standar. Lingkungan yang luas ini juga memungkinkan sirkulasi udara yang lebih segar dan pencahayaan alami yang melimpah, faktor yang sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik siswa yang sedang dalam masa pertumbuhan.

Namun demikian, karakter lokasi yang berada di zona pelatihan kerja ini menuntut penerapan standar keselamatan (Safety Culture) yang jauh lebih tinggi dan ketat dibandingkan sekolah biasa. Mengingat siswa akan hidup berdampingan dengan area bengkel kerja yang aktif beroperasi dengan mesin-mesin berisiko, alat las, dan instalasi listrik tegangan tinggi, maka manajemen risiko menjadi prioritas mutlak. Penataan kawasan di Rejoso dilakukan dengan prinsip zonasi yang tegas, memisahkan antara "Zona Hijau" (area hunian asrama dan kelas yang aman) dengan "Zona Merah" (area bengkel dan praktik yang membutuhkan Alat Pelindung Diri). Disiplin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tidak hanya menjadi materi pelajaran, tetapi menjadi budaya hidup sehari-hari di lokasi ini.

Secara keseluruhan, integrasi kedua lokasi ini menciptakan keseimbangan yang harmonis dalam peta pendidikan Sekolah Rakyat. SR 1A di pusat kota berfungsi sebagai pusat keunggulan akademik dan pembentukan karakter kepemimpinan, sementara SR 1C di jalur industri berfungsi sebagai pusat keunggulan kompetensi teknis dan kemandirian ekonomi. Sinergi kedua lokasi ini memastikan bahwa Kabupaten Pasuruan mampu menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif, adaptif terhadap kebutuhan zaman, dan tetap berakar pada realitas sosial-ekonomi masyarakatnya.

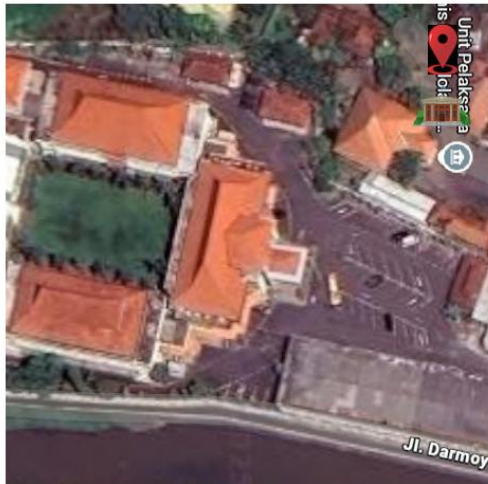
4.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Kampus SR 1A (Eks Kantor Bupati)

A. Tinjauan Lokasi dan Nilai Strategis Aset

Kampus Sekolah Rakyat 1A (SR 1A) menempati lokasi yang memiliki nilai historis dan strategis yang sangat tinggi bagi Kabupaten Pasuruan. Terletak secara prestisius di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14, Kota Pasuruan, kompleks ini merupakan aset daerah berupa Eks Kantor Bupati Pasuruan. Pemilihan lokasi ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan sebuah simbol keberpihakan negara; gedung yang dulunya merupakan pusat kekuasaan birokrasi kini ditransformasikan menjadi pusat pemberdayaan bagi anak-anak warga miskin. Secara geospasial, lokasi ini berada tepat di jantung kota, yang memberikan keuntungan aksesibilitas luar biasa terhadap fasilitas publik vital seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Alun-alun Kota, memudahkan mobilisasi logistik harian maupun penanganan darurat kesehatan.

Keunggulan utama dari Kampus SR 1A adalah luas lahannya yang sangat masif, yakni mencapai 13.970 m². Dalam konteks perencanaan sekolah berasrama (boarding school) di wilayah perkotaan, ketersediaan lahan seluas hampir 1,4 hektar ini adalah sebuah kemewahan yang langka. Luasnya lahan ini memungkinkan tim perencana untuk menerapkan konsep "Kampus Terpadu" (Integrated Campus) dengan zonasi yang longgar dan tidak berdesak-desakan. Area ini mampu menampung seluruh ekosistem pendidikan yang dibutuhkan, mulai dari zona akademik yang tenang, zona asrama yang privat, hingga zona terbuka hijau untuk aktivitas fisik. Pagar keliling yang kokoh yang sudah ada sebelumnya memberikan jaminan keamanan (security perimeter) yang optimal, menciptakan lingkungan yang tertutup dan kondusif bagi pembinaan karakter siswa selama 24 jam penuh.

Sekolah Rakyat 1a



Jalan Hayam Wuruk No. 14 Kota Pasuruan

Ex Kantor Bupati Pasuruan Luas : 13970m²

Rincian Fasilitas:

- Asrama Putra 5 Ruangan
- Asrama Putri 5 Ruangan
- 12 Ruang Kelas
- 2 Ruang Lab
- 1 Ruang Perpustakaan
- 1 Mesjid
- 2 Ruang Makan
- Aula

Gambar 4.1 Lokasi dan Fasilitas

B. Infrastruktur Akademik dan Sarana Pembelajaran

Jantung dari aktivitas di SR 1A adalah zona akademik yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran aktif dan berbasis teknologi. Berdasarkan audit fasilitas fisik, terdapat 12 Ruang Kelas yang siap pakai. Jumlah ruang kelas ini melebihi rasio standar untuk target rombongan belajar awal, memberikan fleksibilitas luar biasa dalam pengelolaan ruang. Setiap ruang kelas didesain dengan ventilasi silang yang baik dan pencahayaan alami yang cukup, memastikan kenyamanan siswa dalam belajar dari pagi hingga siang hari. Kelebihan ruang kelas ini juga memungkinkan sekolah untuk mendedikasikan ruang-ruang khusus bagi kegiatan ekstrakurikuler atau kelas remedial bagi siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan.

Komitmen Sekolah Rakyat terhadap kualitas akademik yang setara dengan sekolah unggulan tercermin dari ketersediaan fasilitas penunjang praktikum. Kampus ini dilengkapi dengan 2 Ruang Laboratorium untuk praktikum sains dasar serta 1 Laboratorium Komputer yang modern. Keberadaan Lab Komputer ini sangat krusial mengingat visi sekolah untuk mencetak lulusan yang melek digital; siswa dari keluarga Desil 1 yang sebelumnya mungkin tidak pernah menyentuh komputer, kini memiliki akses penuh untuk belajar teknologi informasi. Selain itu, terdapat 1 Ruang Perpustakaan yang diposisikan sebagai pusat literasi. Perpustakaan ini tidak

hanya berfungsi sebagai gudang buku, tetapi dirancang sebagai area baca yang nyaman (learning commons) di mana siswa dapat mengerjakan tugas mandiri atau sekadar membaca buku pengayaan di luar jam pelajaran formal.



Gambar 4.2 Laboratorium Komputer



Gambar 4.3 Ruang Kelas

C. Zonasi Hunian dan Kenyamanan Asrama

Aspek paling fundamental dari Sekolah Rakyat adalah sistem asrama (boarding). Mengubah kantor menjadi rumah tinggal memerlukan penataan

yang humanis. Di Kampus SR 1A, zonasi hunian menerapkan prinsip segregasi gender yang ketat demi menjaga norma susila dan kenyamanan privasi. Asrama Putra menempati blok khusus dengan kapasitas 5 Ruangan besar. Begitu pula dengan Asrama Putri, yang ditempatkan di sayap gedung terpisah dengan 5 Ruangan yang setara. Total 10 ruangan asrama ini merupakan hasil konversi dari aula atau ruang kerja bersama (co-working space) kantor lama.

Setiap unit kamar asrama didesain dengan konsep bangsal (dormitory) yang mampu menampung 10-15 siswa. Konsep bangsal ini dipilih untuk membangun jiwa korsa, kebersamaan, dan memudahkan pengawasan oleh Pamong Asrama. Di dalam kamar, setiap siswa mendapatkan hak privasi berupa satu tempat tidur (single bed atau bunk bed) yang layak, kasur busa standar kesehatan, serta lemari loker pribadi untuk menyimpan pakaian dan barang berharga. Sirkulasi udara di asrama diperhatikan secara khusus dengan penambahan kipas angin atau exhaust fan agar kamar tetap sejuk meskipun dihuni banyak siswa.



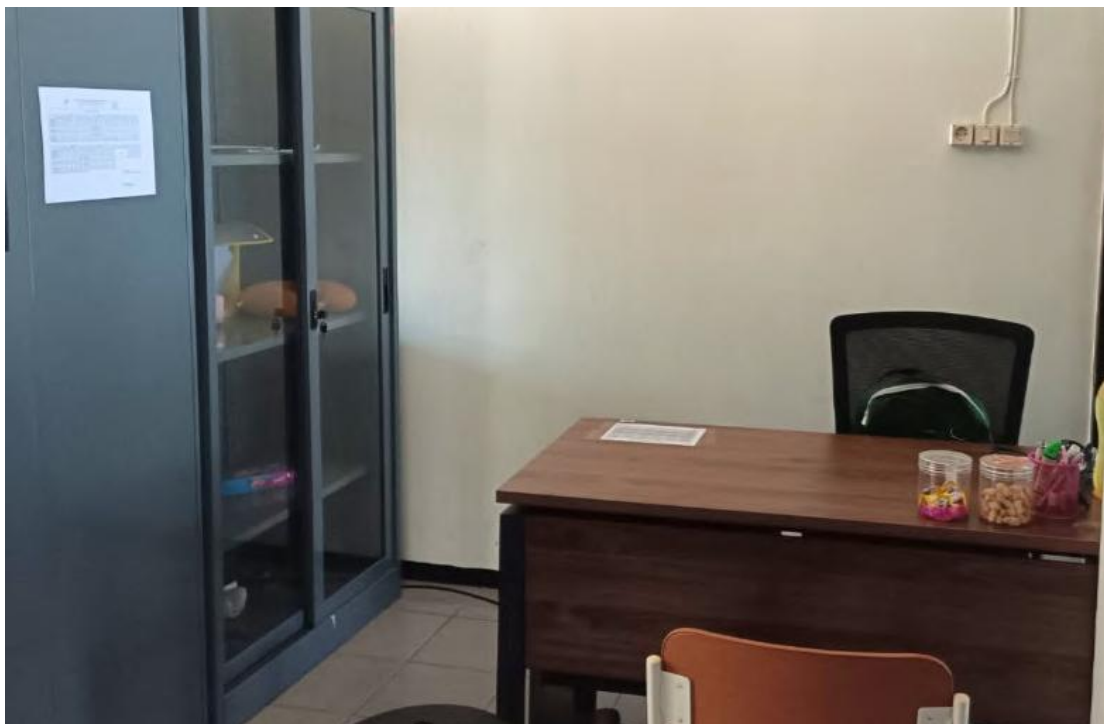
Gambar 4.4 Asrama

D. Fasilitas Sanitasi, Gizi, dan Kesehatan Mental

Kesehatan fisik dan mental siswa menjadi prioritas mutlak dalam operasional sekolah. Untuk menunjang kebersihan diri ratusan siswa, sekolah menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai, termasuk Kamar Mandi Siswa

dan area Tempat Cuci Baju khusus. Ketersediaan area cuci ini penting untuk melatih kemandirian siswa dalam mengurus kebutuhannya (life skills). Dalam hal asupan gizi, tersedia 2 Ruang Makan yang luas. Ruang makan ini dikelola dengan standar higienis tinggi, menyajikan menu makanan sehat 3 kali sehari. Momen makan bersama ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan adab (table manner) dan doa bersama.

Yang membuat SR 1A istimewa dan berbeda dari sekolah asrama biasa adalah keberadaan fasilitas kesehatan mental dan fisik yang komprehensif. Terdapat Ruang UKS yang berfungsi sebagai klinik pertolongan pertama. Namun, yang lebih vital adalah ketersediaan Ruang Konseling. Mengingat latar belakang siswa yang mayoritas berasal dari keluarga Miskin Ekstrem (Desil 1) dan rentan masalah sosial (broken home, yatim piatu), Ruang Konseling ini menjadi "ruang aman" bagi siswa untuk berkonsultasi dengan psikolog atau Guru BK mengenai masalah pribadi, trauma, atau kesulitan adaptasi yang mereka hadapi. Ini membuktikan bahwa Sekolah Rakyat mengadopsi pendekatan pendidikan yang holistik dan berpusat pada anak (student-centered).



Gambar 4.5 Ruang Konseling



Gambar 4.6 UKS



Gambar 4.7 Tempat Cuci Baju

E. Pusat Kegiatan Spiritual dan Sosial

Pembentukan karakter religius dan nasionalis difasilitasi melalui infrastruktur pendukung yang representatif. Di dalam kompleks terdapat 1 Masjid yang cukup besar. Masjid ini menjadi jantung kehidupan spiritual sekolah; tempat di mana sholat berjamaah lima waktu ditegakkan, program tahfidz Al-Qur'an dilaksanakan, dan kultum harian disampaikan. Selain masjid, terdapat sebuah Aula serbaguna yang dapat menampung seluruh civitas akademika. Aula ini menjadi pusat kegiatan komunal, mulai dari pentas seni, seminar motivasi, hingga kegiatan olahraga indoor. Di area luar, terdapat Lapangan Upacara yang digunakan untuk upacara bendera mingguan guna menanamkan patriotisme, serta kegiatan senam pagi dan latihan baris-berbaris untuk melatih kedisiplinan fisik.



Gambar 4.8 Masjid



Gambar 4.9 Lapangan Upacara

F. Analisis Daya Tampung dan Demografi Siswa

Berdasarkan kesiapan infrastruktur di atas, Kampus SR 1A diproyeksikan mampu menampung total 150 Siswa pada tahun ajaran pertama. Komposisi demografi siswa direncanakan terdiri dari 76 Siswa Laki-laki dan 74 Siswa Perempuan. Jumlah ini akan didistribusikan ke dalam 6 Rombongan Belajar (Rombel), yang terbagi rata menjadi 3 Rombel untuk jenjang SMP (SRMP) dan 3 Rombel untuk jenjang SMA (SRMA).

Analisis terhadap latar belakang siswa menunjukkan bahwa target sasaran program ini sangat spesifik. Berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), calon siswa yang akan menghuni SR 1A mayoritas berasal dari klaster kemiskinan terdalam, yakni Desil 1 sebanyak 88 Orang dan Desil 2 sebanyak 65 Orang, serta pemegang SKTM sebanyak 8 orang. Secara geografis, siswa-siswa ini berasal dari kantong-kantong kemiskinan di berbagai kecamatan, termasuk Kraton, Winongan, dan Wonorejo. Kesiapan infrastruktur SR 1A ini diharapkan mampu menjadi "kawah candradimuka" yang mengubah nasib 150 anak tersebut dari keterbatasan ekonomi menjadi generasi emas yang berdaya saing.

4.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Kampus SR 1C (BLK Rejoso)

A. Tinjauan Lokasi dan Kesiapan Aset

Kampus Sekolah Rakyat 1C (SR 1C) menempati posisi strategis di dalam kompleks Unit Pelaksana Teknis (UPT) Latihan Kerja Daerah (LKD) atau yang lebih dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK) Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Berbeda secara fundamental dengan Kampus SR 1A yang terletak di pusat keramaian kota, Kampus SR 1C menawarkan karakteristik lingkungan pendidikan yang unik karena berada di kawasan pengembangan keterampilan teknis yang jauh dari hiruk-pikuk lalu lintas kota. Lokasi ini dinilai sangat kondusif untuk membangun konsentrasi belajar siswa, khususnya dalam penguasaan hard skills. Berdasarkan laporan terbaru mengenai perkembangan pendirian sekolah untuk Tahun Ajaran 2025/2026, status kesiapan fisik di lokasi ini menunjukkan pencapaian yang sangat membanggakan. Progres rehabilitasi fisik gedung yang dialokasikan khusus untuk operasional Sekolah Rakyat telah mencapai angka 100% (seratus persen).

Pencapaian sempurna dalam tahap konstruksi ini memiliki implikasi yang sangat krusial. Artinya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak lagi berkutat pada isu perbaikan fisik dasar seperti atap bocor atau lantai rusak, melainkan sudah siap melangkah ke tahap instalasi peralatan dan manajemen operasional. Seluruh infrastruktur utama yang menjadi tulang punggung sekolah, mulai dari gedung asrama untuk tempat tinggal siswa, ruang-ruang kelas untuk pembelajaran teori, hingga fasilitas penunjang sanitasi, telah siap digunakan sepenuhnya. Kesiapan paripurna ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Dinas Sosial dan tim manajemen sekolah untuk menyambut kedatangan siswa baru dengan percaya diri, tanpa kekhawatiran adanya gangguan teknis konstruksi yang dapat menghambat kenyamanan siswa di hari-hari pertama mereka.



Gambar 4.10 Citra Satelit Lokasi Pembangunan

B. Infrastruktur Akademik dan Sarana Pembelajaran

Sebagai sebuah institusi pendidikan yang terintegrasi langsung dengan fasilitas pelatihan vokasi, Kampus SR 1C dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang tidak hanya layak, tetapi juga representatif untuk standar pendidikan modern. Infrastruktur akademik utama mencakup deretan Ruang Kelas yang telah melalui proses renovasi total. Ruang-ruang ini didesain dengan memperhatikan aspek ergonomi siswa; pencahayaan alami dimaksimalkan untuk kesehatan mata, dan sirkulasi udara diatur sedemikian rupa agar suhu ruangan tetap sejuk meskipun di siang hari. Hal ini sangat penting untuk menjaga fokus dan stamina siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) yang padat. Selain ruang kelas, perhatian khusus juga diberikan pada fasilitas manajemen sekolah dengan tersedianya Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru yang terpisah dan tertata rapi. Pemisahan ruang ini bukan sekadar sekat fisik, melainkan upaya profesionalisasi pengelolaan sekolah, di mana guru memiliki ruang kerja pribadi untuk menyiapkan materi ajar dan melakukan evaluasi kinerja siswa dengan tenang.

Integrasi lokasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) memberikan privilege atau nilai tambah yang tidak dimiliki oleh sekolah reguler lainnya. Siswa SR 1C memiliki akses langsung terhadap ekosistem pelatihan kerja yang nyata. Meskipun fokus utama pada tahap awal pendirian ini adalah penyediaan pendidikan formal untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah

Atas (SMA), keberadaan bengkel-bengkel kerja di sekitar mereka akan memberikan paparan dini (early exposure) terhadap budaya kerja industri. Siswa akan terbiasa melihat disiplin kerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan operasional mesin, yang secara tidak langsung akan membentuk mindset teknis mereka sejak dini.



Gambar 4.11 Ruang Kelas



Gambar 4.12 Ruang Guru

C. Zonasi Hunian dan Kenyamanan Asrama

Aspek hunian atau boarding di Kampus SR 1C dirancang dengan standar yang jauh melampaui sekadar tempat tidur. Pemerintah daerah menyadari bahwa asrama adalah "rumah pengganti" bagi siswa, sehingga kenyamanan psikologis menjadi prioritas. Fasilitas asrama di lokasi ini dikelompokkan menjadi beberapa blok terpisah untuk menjamin privasi dan ketertiban. Salah satu fasilitas unggulan yang menjadi sorotan adalah Asrama Putri yang diberi label "Asrama Putri Deluxe". Penggunaan istilah Deluxe ini bukan tanpa alasan; ia merepresentasikan kualitas fasilitas yang lebih prima dengan penataan interior yang lebih estetik, kebersihan yang terjaga ketat, dan fasilitas pendukung yang lebih lengkap dibandingkan asrama standar pelatihan biasa. Kamar-kamar di asrama ini telah dilengkapi dengan tempat tidur bertingkat (bunk bed) yang kokoh dari bahan besi berkualitas, kasur busa tebal yang menjamin kualitas tidur nyenyak, serta lemari penyimpanan pribadi untuk setiap siswa.

Tidak hanya memikirkan siswa, perencanaan infrastruktur di SR 1C juga mencakup penyediaan Asrama Guru di dalam kompleks yang sama. Keberadaan asrama guru ini memegang peran yang sangat vital dalam sistem pendidikan berasrama. Ini memungkinkan penerapan sistem pengawasan melekat (built-in supervision) yang efektif. Guru atau pamong tidak hanya hadir saat jam sekolah (07.00-14.00), tetapi hidup berdampingan dengan siswa selama 24 jam penuh. Hal ini memastikan bahwa setiap dinamika yang terjadi di asrama, mulai dari masalah kesehatan siswa di malam hari, bimbingan belajar tambahan, hingga pengawasan ibadah subuh, selalu didampingi oleh figur orang tua pengganti yang kompeten.



Gambar 4.13 Kamar Asrama Guru



Gambar 4.14 Kamar Asrama Putri Deluxe



Gambar 4.15 Asrama

D. Fasilitas Penunjang Kehidupan Harian

Untuk mendukung ritme aktivitas harian siswa yang sangat padat mulai dari bangun pagi, sekolah, mengaji, hingga istirahat malam Kampus SR 1C dilengkapi dengan ekosistem fasilitas pendukung yang memadai. Salah satu fasilitas vital yang telah selesai dibangun dan siap beroperasi adalah Kantin sekolah. Kantin ini didesain bukan sekadar sebagai tempat makan, melainkan sebagai area refetori yang bersih, terang, dan higienis. Di sinilah siswa akan mendapatkan asupan gizi harian mereka sebanyak 3 kali sehari. Tata letak kantin dibuat terbuka (open space) untuk memastikan sirkulasi udara yang lancar, mencegah bau tidak sedap, dan menciptakan suasana makan bersama yang hangat dan kekeluargaan.

Selain kantin, penataan lansekap atau lingkungan fisik di sekitar blok asrama dan ruang kelas juga mendapatkan perhatian serius. Akses jalan penghubung antar-gedung telah diperbaiki dengan paving block yang rapi, dan taman-taman kecil mulai ditata untuk memberikan unsur hijau. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan kesan kaku atau "gersang" yang biasanya

melekat pada kompleks pelatihan kerja, dan menggantinya dengan suasana yang lebih homely (seperti di rumah). Tujuannya adalah agar anak-anak yang masih berusia dini (terutama siswa SD) yang harus tinggal jauh dari orang tua, tetap merasa nyaman, betah, dan tidak mengalami homesick yang berlebihan.



Gambar 4.16 Kantin

E. Analisis Daya Tampung dan Tantangan Rekrutmen Siswa

Berdasarkan evaluasi data rekrutmen siswa baru untuk Tahun Ajaran 2025/2026, Kampus SR 1C mencatatkan dinamika pencapaian target yang menarik untuk dicermati. Pada jenjang pendidikan menengah atas atau SMA, animo masyarakat terbukti sangat tinggi. Dari kuota yang ditetapkan sebanyak 2 Rombongan Belajar (Rombel), seluruh kursi telah berhasil terisi penuh dengan total 50 Siswa. Keberhasilan pemenuhan kuota 100% untuk jenjang SMA ini mengindikasikan bahwa masyarakat sangat membutuhkan akses pendidikan menengah berkualitas yang gratis, dan mereka melihat Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret untuk masa depan anak-anak mereka.

Di sisi lain, tantangan sosiologis yang cukup signifikan ditemukan pada proses rekrutmen jenjang pendidikan dasar. Dari kuota 2 Rombel yang disediakan untuk jenjang SD, hingga saat ini baru terpenuhi 1 Rombel dengan jumlah 25

Siswa. Analisis lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengidentifikasi bahwa kendala utamanya bukanlah pada ketiadaan peminat, melainkan pada faktor psikologis orang tua. Banyak orang tua dari keluarga tidak mampu yang merasa belum siap secara mental (not mentally ready) untuk melepas anak mereka yang masih sangat kecil baru berumur sekitar 7 tahun atau Kelas 1 SD untuk tinggal di asrama dan berpisah dari keluarga. Selain itu, faktor teknis berupa sempitnya waktu sosialisasi mengingat tahun ajaran baru sudah dimulai pada bulan Juni 2025, turut berkontribusi pada belum maksimalnya serapan siswa SD.

Meskipun demikian, dengan total siswa yang sudah terkonfirmasi masuk sebanyak 75 Siswa (gabungan 50 siswa SMA dan 25 siswa SD), Kampus SR 1C di Rejoso dinyatakan SIAP OPERASI. Keberadaan struktur kelembagaan yang kuat melalui Tim Satuan Tugas Sekolah Rakyat yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dan melibatkan lintas sektor mulai dari Bappelitbangda hingga Dinas Pendidikan menjadi jaminan bahwa evaluasi terhadap kendala rekrutmen SD ini akan segera dicarikan solusinya. Langkah mitigasi dan pendekatan persuasif kepada orang tua akan terus dilakukan agar kuota pendidikan gratis ini dapat terserap maksimal pada gelombang berikutnya.

DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASURUAN**◆◆◆ REKRUTMEN SISWA ◆◆◆**

NO	KUOTA	TERPENUHI	JUMLAH SISWA	KET
1	2 ROMBEL	2 ROMBEL	50	SMA
2	2 ROMBEL	1 ROMBEL	25	SD

Gambar 4.17 Rekrutmen Siswa

4.4 Standarisasi Sarana Pendukung Kehidupan Berasrama

Agar Sekolah Rakyat dapat menjadi rumah kedua yang bermartabat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan standar pelayanan minimum infrastruktur yang ketat. Standarisasi hunian diatur sedemikian rupa untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan siswa, di mana setiap siswa berhak mendapatkan ruang pribadi yang layak meliputi satu tempat tidur yang sehat, kasur busa standar, serta lemari penyimpanan barang. Tata letak tempat tidur diatur dengan jarak minimal tertentu untuk menjamin sirkulasi udara yang baik dan memitigasi risiko penularan penyakit menular di dalam komunitas tertutup. Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian utama dengan rencana pembangunan tandon air cadangan berkapasitas besar dan sistem filtrasi air, mengingat kebutuhan air untuk mandi, mencuci, dan beribadah di asrama jauh lebih tinggi dibandingkan rumah tangga biasa.

Selain kebutuhan fisik dasar, infrastruktur pendukung pembinaan karakter dan kesehatan juga disiapkan secara serius. Setiap lokasi kampus wajib memiliki musholla atau masjid yang representatif untuk menampung seluruh civitas akademika dalam kegiatan ibadah berjamaah, karena masjid adalah pusat kurikulum pengasuhan rohani. Di sisi kesehatan, sekolah akan dilengkapi dengan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) yang memiliki fasilitas ruang pemeriksaan, kotak P3K lengkap, tabung oksigen, dan ruang isolasi sementara. Ruang isolasi ini sangat vital untuk memisahkan siswa yang terindikasi sakit menular sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, demi menjaga kesehatan komunitas asrama secara keseluruhan.

Sistem keamanan lingkungan juga diperketat dengan standar proteksi 24 jam. Hal ini diwujudkan melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis seperti gerbang utama, lorong asrama, ruang makan, dan area-area yang tidak terjangkau pandangan langsung. Pengawasan elektronik ini didukung oleh penempatan petugas keamanan di pos jaga dengan sistem satu pintu (one gate system), di mana akses keluar masuk orang luar dibatasi secara ketat. Protokol keamanan ini diterapkan bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi siswa dari ancaman eksternal maupun mencegah potensi perundungan atau kekerasan di lingkungan internal sekolah.

Mengingat sempitnya rentang waktu yang tersedia menuju pembukaan Tahun Ajaran Baru, strategi pembangunan fisik dilaksanakan dalam dua fase prioritas yang

terukur. Fase pertama adalah fase percepatan kelayakan huni yang berlangsung hingga pertengahan tahun. Pada fase ini, seluruh sumber daya dikerahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat darurat dan esensial, seperti perbaikan atap yang bocor, pengecatan ulang dinding, pembuatan sekat kamar, pembangunan unit toilet baru, serta instalasi dasar kelistrikan dan air bersih. Target utama fase ini adalah memastikan bahwa pada saat siswa datang, gedung sudah siap huni dengan standar keamanan dan sanitasi yang layak, meskipun mungkin dari sisi estetika belum sepenuhnya sempurna.

Setelah siswa mulai menempati asrama dan kegiatan belajar mengajar berjalan, pembangunan berlanjut ke fase kedua, yaitu fase penyempurnaan dan pengembangan. Pekerjaan pada tahap ini dilakukan dengan manajemen konstruksi yang hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan kebisingan yang berlebihan. Fokus pekerjaan bergeser pada pembangunan fasilitas penunjang akademik seperti laboratorium komputer, perpustakaan, penataan taman atau lansekap, serta penyempurnaan fasad bangunan agar terlihat lebih modern dan inspiratif. Dengan pentahapan yang realistis ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan optimis dapat menyulap aset gedung yang ada menjadi fasilitas pendidikan unggulan yang siap mencetak generasi emas daerah.

4.5 Strategi dan Tahapan Pembangunan Fisik Berkelanjutan

Mengingat sempitnya rentang waktu yang tersedia ("time constraint") antara penetapan kebijakan dengan jadwal pembukaan Tahun Ajaran Baru, strategi pembangunan fisik dan renovasi gedung dilaksanakan dengan manajemen proyek yang presisi melalui dua fase prioritas yang terukur. Fase pertama ditetapkan sebagai "Fase Percepatan Kelayakan Huni" yang berlangsung secara maraton hingga pertengahan tahun, tepat sebelum siswa pertama kali menginjakkan kaki di asrama. Pada fase kritis ini, seluruh sumber daya, baik tenaga kerja konstruksi maupun anggaran, dikerahkan secara masif untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat darurat, fungsional, dan esensial. Fokus pekerjaan meliputi perbaikan struktur atap yang bocor untuk mencegah kerusakan interior, pengecatan ulang dinding untuk menghilangkan kesan kusam gedung lama, pembuatan sekat-sekat partisi kamar yang rapi, serta pembangunan unit-unit toilet dan kamar mandi baru dalam jumlah

yang cukup. Selain itu, instalasi dasar mekanikal dan elektrik (ME), seperti perbaikan kabel listrik untuk mencegah korsleting dan instalasi pipa air bersih, menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar. Target utama atau output dari fase pertama ini adalah memastikan bahwa pada saat "Day One" siswa datang, gedung tersebut sudah dalam kondisi 100% siap huni (habitable), aman, dan memenuhi standar sanitasi, meskipun mungkin dari sisi estetika arsitektural atau ornamen dekoratif belum sepenuhnya sempurna.

Setelah fase krusial tersebut terlewati dan siswa mulai menempati asrama serta kegiatan belajar mengajar (KBM) mulai berjalan rutin, proses pembangunan tidak serta merta berhenti, melainkan beralih ke strategi "Fase Kedua: Penyempurnaan dan Pengembangan". Fase ini memiliki tantangan tersendiri karena pekerjaan konstruksi harus dilakukan berdampingan dengan aktivitas operasional sekolah. Oleh karena itu, pekerjaan pada tahap ini dilakukan dengan manajemen konstruksi yang sangat hati-hati dan terjadwal (silent construction methods), guna memastikan tidak ada polusi debu maupun gangguan kebisingan yang berlebihan yang dapat memecah konsentrasi belajar siswa. Fokus pekerjaan pada tahap lanjutan ini bergeser pada peningkatan kualitas fasilitas penunjang akademik dan estetika lingkungan.

Agenda utama fase kedua meliputi pembangunan atau upgrade fasilitas fasilitas laboratorium canggih, seperti laboratorium komputer dan bahasa, serta pengembangan perpustakaan modern yang nyaman. Selain itu, penataan lansekap (landscape) berupa pembuatan taman-taman hijau dan area duduk terbuka juga dikerjakan pada tahap ini untuk menciptakan suasana psikologis yang sejuk dan mereduksi stres siswa. Aspek visual bangunan juga mulai disentuh melalui penyempurnaan fasad (facade) agar gedung sekolah terlihat lebih modern, inspiratif, dan mencerminkan semangat baru, menghilangkan kesan kaku bekas kantor pemerintahan. Dengan strategi pentahapan yang realistis dan adaptif ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat optimis dapat menyulap aset gedung yang ada menjadi sebuah fasilitas pendidikan unggulan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga membanggakan, siap menjadi kawah candradimuka untuk mencetak generasi emas daerah yang tangguh dan berkarakter.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian kajian mendalam dan analisis komprehensif yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan fundamental bahwa pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Pasuruan bukan sekadar sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan strategis (*strategic necessity*). Data-data empiris menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata, di mana pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja muda dari kalangan prasejahtera, sehingga menyisakan residu kemiskinan dan pengangguran yang persisten. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi secara radikal. Program ini merepresentasikan pergeseran paradigma pembangunan daerah, dari yang semula berfokus pada pembangunan fisik semata, menuju investasi sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan. Kehadiran negara melalui fasilitas pendidikan gratis, asrama, dan jaminan biaya hidup menjadi bukti nyata implementasi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin.

Secara teknis operasional, keputusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memanfaatkan aset gedung Eks Kantor Bupati di Jalan Hayam Wuruk dan Kompleks Balai Latihan Kerja (BLK) di Rejoso sebagai lokasi perintisan adalah langkah yang sangat cerdas dan efisien. Analisis kelayakan menunjukkan bahwa kedua lokasi tersebut memiliki nilai strategis yang tinggi namun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal (*under-utilized assets*). Model pemanfaatan aset ini memberikan keuntungan ganda: pertama, menekan biaya investasi awal secara signifikan karena tidak perlu melakukan pengadaan tanah dan pembangunan gedung baru dari nol; kedua, mempercepat *time-to-market* atau waktu operasional sekolah sehingga dapat segera menerima siswa pada tahun ajaran mendatang. Kampus Hayam Wuruk dengan aksesibilitas pusat kotanya sangat tepat untuk pengembangan karakter dan akademis, sementara Kampus Rejoso dengan fasilitas bengkelnya memberikan keunggulan mutlak dalam pendidikan vokasi berbasis industri.

Lebih jauh, model pendidikan integratif yang diusung Sekolah Rakyat yang menggabungkan kurikulum akademik formal, pelatihan vokasi bersertifikat, dan pengasuhan karakter berbasis asrama menawarkan solusi holistik yang tidak ditemukan pada sekolah reguler. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem seringkali gagal di sekolah biasa bukan karena kurang cerdas, tetapi karena ekosistem lingkungan mereka yang tidak mendukung. Dengan memindahkan mereka ke dalam lingkungan asrama yang terkontrol dan kondusif, Sekolah Rakyat memberikan kesempatan yang adil (level playing field) bagi anak miskin untuk berkompetisi. Oleh karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat kelak tidak hanya akan diukur dari angka kelulusan siswa, tetapi dari dampak pengganda (multiplier effect) ekonomi yang ditimbulkan ketika lulusannya mampu bekerja, mandiri secara finansial, dan mengangkat derajat kesejahteraan keluarganya. Ini adalah investasi peradaban jangka panjang yang akan mengubah beban demografi menjadi bonus demografi yang produktif bagi Kabupaten Pasuruan.

5.2 Rekomendasi

Guna menjamin keberlanjutan dan keberhasilan operasional Sekolah Rakyat, sejumlah langkah strategis perlu segera diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pertama, percepatan payung hukum berupa Peraturan Bupati atau Keputusan Kepala Daerah harus menjadi prioritas utama. Regulasi ini akan menjadi landasan legal bagi pengalokasian anggaran lintas tahun, struktur organisasi pengelola, serta mekanisme kerja sama antar-perangkat daerah. Tanpa dasar hukum yang kuat, program ini rentan mengalami kendala administratif di kemudian hari, terutama terkait penggunaan aset dan pencairan dana operasional.

Kedua, sinergi lintas sektor harus dijaga agar tidak sekadar menjadi slogan. Gugus tugas yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Bappelitbangda harus bekerja dalam satu komando yang solid. Dinas Sosial harus memastikan akurasi data rekrutmen siswa agar benar-benar tepat sasaran pada kelompok miskin ekstrem, sementara Dinas Tenaga Kerja dan industri mitra harus terlibat aktif dalam penyusunan kurikulum vokasi agar lulusan benar-benar terserap pasar kerja. Ego sektoral harus dikesampingkan demi tujuan besar mencetak generasi emas Pasuruan.

Ketiga, dan tidak kalah penting, adalah pelibatan peran serta masyarakat dan dunia usaha melalui skema kemitraan. Pemerintah daerah perlu membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan di kawasan industri Pasuruan untuk berkontribusi, baik melalui donasi peralatan praktik, penyediaan instruktur tamu, maupun komitmen penyerapan tenaga kerja lulusan. Dengan menjadikan Sekolah Rakyat sebagai proyek kolaborasi semesta (pentahelix), beban pemerintah akan lebih ringan dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah ini akan semakin kuat. Akhirnya, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi role model atau percontohan nasional tentang bagaimana sebuah daerah mengelola pendidikan afirmatif yang berkualitas, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyatnya.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
dan Pengembangan Manusia

HERU MAULANA, S.Sos.